



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN GURU

Mata Pelajaran

PPKn SMA / SMK

Kelompok Kompetensi I

Profesional :

**Pengembangan Pelaksanaan Nilai, Norma,
Moral dalam PPKn**

Pedagogik :

**Analisis Penilaian Autentik & Penyusunan
KTI**

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016**



MODUL GURU PEMBELAJAR

**Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K)**

Kelompok Kompetensi I

**Profesional: Pengembangan Pelaksanaan Nilai, Norma, Moral dalam
PPKn**

Pedagogik: Analisis Penilaian Autentik dan Penyusunan KTI

PENULIS

Dr. Mukiyat, M.Pd.

Dr. Suwarno, M.H.

Drs. H. M. Ilzam Marzuk, M.A.Educ.

Diana Wulandari, S.Pd.

Dr. Didik Sukriono, S.H., M.Hum.

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016**

Penulis:

1. Dr. Mukiyat, M.Pd., PPPPTK PKn dan IPS, 081333490557.
2. Dr. Suwarno, M.H., PPPPTK PKn dan IPS, 082142618400, email: doktorsuwarno@yahoo.co.id
3. Drs. H. M. Ilzam Marzuk, M.A.Educ., PPPPTK PKn dan IPS, 081334986165, email: ilzamarzuk@gmail.com
4. Diana Wulandari, S.Pd., PPPPTK PKn dan IPS, 085725944181, email: dianawulandari130587@gmail.com
5. Dr. Didik Sukriono, S.H., M.Hum., Universitas Negeri Malang, 0816552682, email: didik.sukriono.fis@um.ac.id

Penelaah:

1. Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Si., Universitas Negeri Malang, 081233900769, email: nur_wahyu_rochmadi@yahoo.co.id
2. Drs. Margono, M.Pd., M.Si., Universitas Negeri Malang, 081233244852.
3. Dr. Didik Sukriono, S.H., M.Hum., Universitas Negeri Malang, 0816552682, email: didik.sukriono.fis@um.ac.id
4. Dra. Arbaiyah Prantiasih, M.Si., Universitas Negeri Malang, 085755975488.
5. Siti Awaliyah, S.Pd., SH, M.Hum., Universitas Negeri Malang, 081334712151, email: siti.awaliyah.fis@um.ac.id
6. Muhammad Rohmatul Adib, S.Pd., SMA Negeri 3 Kota Malang, 085755633152, email: beda_rohmat@yahoo.co.id
7. Drs. Dewantara, SMA Negeri 7 Kota Malang, 08179631652.
8. Dra. Husniah, SMA Negeri 4 Kota Malang, 08170519440, email: husniahazeth@gmail.com
9. Sukamto, S.Pd., SMA Negeri 1 Kandangan Kab. Kediri, 085231393549, email: sukamto354@gmail.com
10. Drs. Teguh Santosa, M.Pd., SMA Negeri 8 Kota Malang, 08133920342, email: teguhsma8mlq@yahoo.com

Ilustrator:

.....

Copy Right 2016.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengkopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersil tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting bagi kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi tersebut dibedakan menjadi 10 (sepuluh) peta kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (*online*), dan campuran (*blended*) tatap muka dengan daring.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP *online* untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal

Guru dan Tenaga Kependidikan



Sumarna Surapranata, Ph.D

NIP. 195908011985032001

KATA PENGANTAR

Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kewajiban bagi Guru. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Sejalan dengan Program Guru Pembelajar, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan, salah satunya dalam Modul Pelatihan Guru Pembelajar dari berbagai mata pelajaran.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pelatihan Guru Pembelajar, khususnya modul untuk mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam Kelompok Kompetensi A sampai dengan J. Dengan selesainya penyusunan modul ini, diharapkan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pembelajar baik yang dilaksanakan dengan moda Tatap Muka, Daring (Dalam Jaringan) Murni maupun Daring Kombinasi bisa mengacu dari modul-modul yang telah disusun ini.

Semoga modul ini bisa dipergunakan sebagai acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PPKn dan IPS.



DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
Pendahuluan	1
Kegiatan Pembelajaran 1	9
A. Tujuan Pembelajaran	9
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	9
C. Uraian Materi	10
D. Aktivitas Pembelajaran	13
E. Latihan/Kasus/Tugas	13
F. Rangkuman	13
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	14
Kegiatan Pembelajaran 2	15
A. Tujuan Pembelajaran	15
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	15
C. Uraian Materi	16
D. Aktivitas Pembelajaran	18
E. Latihan/Kasus/Tugas	18
F. Rangkuman	18
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	19
Kegiatan Pembelajaran 3	20
A. Tujuan Pembelajaran	20
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	20
C. Uraian Materi	20
D. Aktivitas Pembelajaran	22
E. Latihan/Kasus/Tugas	23
F. Rangkuman	23
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	24

Kegiatan Pembelajaran 4	25
A. Tujuan Pembelajaran	25
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	25
C. Uraian Materi	25
D. Aktivitas Pembelajaran	27
E. Latihan/Kasus/Tugas	28
F. Rangkuman	28
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	29
Kegiatan Pembelajaran 5	30
A. Tujuan Pembelajaran	30
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	30
C. Uraian Materi	30
D. Aktivitas Pembelajaran	32
E. Latihan/Kasus/Tugas	33
F. Rangkuman	33
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	34
Kegiatan Pembelajaran 6	35
A. Tujuan Pembelajaran	35
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	35
C. Uraian Materi	35
D. Aktivitas Pembelajaran	41
E. Latihan/Kasus/Tugas	42
F. Rangkuman	42
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	43
Kegiatan Pembelajaran 7	44
A. Tujuan Pembelajaran	44
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	44
C. Uraian Materi	44
D. Aktivitas Pembelajaran	49
E. Latihan/Kasus/Tugas	50
F. Rangkuman	50
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	50
Kegiatan Pembelajaran 8	52

A. Tujuan Pembelajaran	52
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	52
C. Uraian Materi	53
D. Aktivitas Pembelajaran	56
E. Latihan/Kasus/Tugas	57
F. Rangkuman	57
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	57
Kegiatan Pembelajaran 9	58
A. Tujuan Pembelajaran	58
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	58
C. Uraian Materi	58
D. Aktivitas Pembelajaran	60
E. Latihan/Kasus/Tugas	62
F. Rangkuman	62
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	63
Kegiatan Pembelajaran 10	64
A. Tujuan Pembelajaran	64
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	64
C. Uraian Materi	64
D. Aktivitas Pembelajaran	71
E. Latihan/Kasus/Tugas	72
F. Rangkuman	73
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	74
Kegiatan Pembelajaran 11.....	75
A. Tujuan Pembelajaran	75
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	75
C. Uraian Materi	75
D. Aktivitas Pembelajaran	77
E. Latihan/Kasus/Tugas	78
F. Rangkuman	79
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	79
Kegiatan Pembelajaran 12	80
A. Tujuan Pembelajaran	80

B. Indikator Pencapaian Kompetensi	80
C. Uraian Materi	80
D. Aktivitas Pembelajaran	85
E. Latihan/Kasus/Tugas	86
F. Rangkuman	86
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	86
Kunci Jawaban Latihan/Kasus/Tugas	87
Evaluasi	96
Penutup	105
Daftar Pustaka	106
Glosarium	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pohon Masalah Model Pertama	37
Gambar 2. Pohon Masalah Model Kedua	37
Gambar 3. Contoh Penerapan Metode MAAMS dalam Kasus Tawuran Antar Pelajar	38
Gambar 4. Diagram Tulang Ikan	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Contoh Tabel Analisis SWOT	48
---	----

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu "Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif".

Program guru pembelajar sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan agar mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan guru pembelajar akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan pedagogik dan profesional yang dipersyaratkan. Guru dan tenaga kependidikan melaksanakan program guru pembelajar baik secara mandiri maupun kelompok. Penyelenggaraan kegiatan guru pembelajar dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Dalam hal ini dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK.

Untuk mendukung pelaksanaan tersebut diperlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta. Modul merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Modul guru pembelajar merupakan salah satu bahan referensi bagi pelaksanaan kegiatan guru pembelajar. Penyusunan modul ini telah melalui beberapa proses dan mekanisme yaitu tahap: persiapan, penyusunan, pematapan (*sanctioning*), dan pencetakan. Modul ini disusun untuk memberikan informasi/gambaran/deskripsi dan pembelajaran mengenai materi-materi yang relevan, serta disesuaikan dengan standar isi kurikulum.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan modul guru pembelajar secara umum adalah memberikan pemahaman dan sebagai salah satu referensi bagi peserta diklat, sehingga kompetensi ranah profesional dan paedagogik tercapai. Kompetensi inti dalam ranah profesional yang hendak dicapai dalam pembelajaran pada modul ini mencakup:

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK.
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK.
3. Mengembangkan materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK secara kreatif.

Sedangkan kompetensi inti dalam ranah paedagogik yang hendak dicapai dalam pembelajaran pada modul ini mencakup:

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual.
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
7. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
8. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

C. Peta Kompetensi

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
1.	Pengembangan Implementasi Nilai-nilai Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan modern. 2. Menganalisis cara-cara pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan modern. 3. Menganalisis pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat modern. 4. Menganalisis pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara modern. 5. Menganalisis kendala-kendala dan cara mengatasi pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam aspek kehidupan modern. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan modern. 2. Cara-cara pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan modern. 3. Pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat modern. 4. Pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara modern. 5. Kendala-kendala dan cara mengatasi pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam aspek kehidupan modern.
2.	Pengembangan Implementasi Nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis pengembangan implementasi nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 2. Menganalisis cara-cara pengembangan implementasi nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan implementasi nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 2. Cara-cara pengembangan implementasi nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
		<p>tahun 1945.</p> <p>3. Menganalisis pengembangan implementasi nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat.</p> <p>4. Menganalisis pengembangan implementasi nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bernegara.</p> <p>5. Menganalisis kendala-kendala dan cara mengatasi pengembangan implementasi nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam semua aspek kehidupan.</p>	<p>3. Pengembangan implementasi nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat.</p> <p>4. Pengembangan implementasi nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bernegara.</p> <p>5. Kendala-kendala dan cara mengatasi pengembangan implementasi nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam semua aspek kehidupan.</p>
3.	Pengembangan Implementasi Nilai-nilai Nasionalisme dan Patriotisme	<p>1. Menjelaskan pengembangan permasalahan implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme.</p> <p>2. Menjelaskan cara-cara pengembangan permasalahan implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme.</p>	<p>1. Pengembangan permasalahan implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme.</p> <p>2. Cara-cara pengembangan permasalahan implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme.</p>

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
4.	Pengembangan Implementasi <i>Good Governance</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyimpulkan hasil analisis permasalahan implementasi <i>good governance</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia. 2. Memberikan saran dan rekomendasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesimpulan hasil analisis permasalahan implementasi <i>good governance</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia. 2. Saran dan rekomendasi.
5.	Pengembangan Implementasi Penegakan Hukum dan Peradilan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengembangan implementasi penegakan hukum dan peradilan nasional. 2. Menguasai jenis-jenis pengembangan implementasi penegakan hukum dan peradilan nasional. 3. Menguasai cara-cara pengembangan implementasi penegakan hukum dan peradilan nasional. 4. Menguasai kondisi implementasi pengembangan hukum dan peradilan di Indonesia saat ini. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan implementasi penegakan hukum dan peradilan nasional. 2. Jenis-jenis pengembangan implementasi penegakan hukum dan peradilan nasional. 3. Cara-cara pengembangan implementasi penegakan hukum dan peradilan nasional. 4. Kondisi implementasi pengembangan hukum dan peradilan di Indonesia saat ini.
6.	Analisis Permasalahan Implementasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kesatuan Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskusikan permasalahan dalam implementasi kesadaran berbangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia. 2. Mendiskusikan metode analisis permasalahan. 3. Menganalisis permasalahan dalam implementasi kesadaran berbangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan metode-metode analisis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan dalam implementasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kesatuan Republik Indonesia 2. Metode analisis permasalahan. 3. Analisis permasalahan dalam implementasi kesadaran berbangsa dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan metode-metode analisis permasalahan.

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
		permasalahan.	
7.	Analisis Permasalahan Implementasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskusikan permasalahan dalam implementasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. 2. Mendiskusikan metode analisis permasalahan. 3. Menganalisis permasalahan dalam implementasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia dengan menggunakan metode-metode analisis permasalahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan dalam implementasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. 2. Metode analisis permasalahan. 3. Analisis permasalahan dalam implementasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia dengan menggunakan metode-metode analisis permasalahan.
8.	Pengembangan Implementasi Sistem dan Budaya Politik di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis pengembangan implementasi sistem dan Budaya Politik di Indonesia. 2. Menganalisis faktor-faktor pendukung pengembangan implementasi sistem dan Budaya Politik di Indonesia. 3. Memahami model-model pengembangan implementasi sistem dan Budaya Politik di Indonesia. 4. Menganalisis kendala-kendala pengembangan implementasi sistem dan Budaya Politik di Indonesia dalam berpolitik yang demokratis. 5. Menganalisis contoh sikap dan perilaku pengembangan implementasi sistem dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan implementasi sistem dan Budaya Politik di Indonesia. 2. Faktor-faktor pendukung pengembangan implementasi sistem dan Budaya Politik di Indonesia. 3. Model-model pengembangan implementasi sistem dan Budaya Politik di Indonesia. 4. Kendala-kendala pengembangan implementasi sistem dan Budaya Politik di Indonesia dalam berpolitik yang demokratis. 5. Contoh sikap dan perilaku pengembangan implementasi sistem dan Budaya Politik di Indonesia. 6. Cara-cara mengatasi

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
		Budaya Politik di Indonesia. 6. Menganalisis cara-cara mengatasi kendala-kendala pengembangan implementasi sistem dan Budaya Politik di Indonesia dalam berpolitik yang demokratis.	kendala-kendala pengembangan implementasi Sistem dan Budaya Politik di Indonesia dalam berpolitik yang demokratis.
9.	Pengembangan Hubungan Internasional Negara Kesatuan Republik Indonesia	Merekomendasi pengembangan hubungan internasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Pengembangan hubungan internasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.	Penilaian Autentik sebagai Penilaian Pembelajaran PPKn SMA/SMK	1. Mendalami konsep penilaian autentik. 2. Menyusun instrumen penilaian sikap. 3. Menyusun instrumen penilaian pengetahuan. 4. Menyusun instrumen penilaian keterampilan.	1. Konsep penilaian autentik. 2. Instrumen penilaian sikap 3. Instrumen penilaian pengetahuan 4. Instrumen penilaian keterampilan.
11.	Pemecahan Permasalahan Penyusunan Silabus dan RPP	Memecahkan permasalahan dalam penyusunan silabus dan RPP PPKn.	Permasalahan dalam penyusunan silabus dan RPP PPKn.
12.	Kajian Kritis Karya Tulis Ilmiah	1. Memahami cara menulis kajian kritis. 2. Menyusun kajian kritis.	Kajian Kritis Karya Tulis Ilmiah.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam modul ini mencakup:

1. Pengembangan Implementasi Nilai-nilai Pancasila.
2. Pengembangan Implementasi Nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pengembangan Implementasi Nilai-nilai Nasionalisme dan Patriotisme.

4. Pengembangan Implementasi *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia.
5. Pengembangan Implementasi Penegakan Hukum dan Peradilan Nasional.
6. Analisis Permasalahan Implementasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Analisis Permasalahan Implementasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
8. Pengembangan Implementasi Sistem dan Budaya Politik di Indonesia.
9. Pengembangan Hubungan Internasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Penilaian Autentik sebagai Penilaian Pembelajaran PPKn SMA/SMK.
11. Pemecahan Permasalahan Penyusunan Silabus dan RPP.
12. Kajian Kritis Karya Tulis Ilmiah.

E. Saran Cara penggunaan modul

Petunjuk penggunaan modul ini adalah sebagai berikut:

1. Membaca judul modul dengan teliti.
2. Membaca pendahuluan agar memahami latar belakang penulisan modul, tujuan penyusunan modul, peta kompetensi dalam modul, ruang lingkup pembahasan, serta petunjuk penggunaan modul yang termuat dalam saran cara penggunaan modul.
3. Mengikuti alur kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan pembelajaran 1 sampai dengan kegiatan pembelajaran 12. Kegiatan pembelajaran menunjukkan mata diklat atau topik yang akan dibahas dalam kegiatan diklat. Setiap kegiatan pembelajaran memiliki tujuan, indikator pencapaian, aktivitas pembelajaran, latihan/kasus/tugas, rangkuman materi, umpan balik dan tindak lanjut.
4. Peserta dapat membaca kunci jawaban latihan/kasus/tugas untuk memeriksa kebenaran hasil kerja setelah mengerjakan latihan/ kasus/tugas.
5. Selanjutnya peserta dapat berlatih mengerjakan evaluasi sebagai persiapan dalam mengerjakan *post test* di sesi akhir kegiatan ini.
6. Terakhir peserta membaca penutup, daftar pustaka, dan glosarium.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA

Disusun Dr. Mukiyat, M.Pd.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat:

1. Menganalisis pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan modern dengan baik.
2. Menganalisis cara-cara pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan modern dengan baik.
3. Menganalisis pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat modern dengan baik.
4. menganalisis pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara modern dengan baik.
5. Menganalisis kendala-kendala dan cara mengatasinya pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam aspek kehidupan modern dengan baik.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menganalisis pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan modern.
2. Menganalisis cara-cara pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan modern.
3. Menganalisis pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat modern.
4. Menganalisis pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara modern.
5. Menganalisis kendala-kendala dan cara mengatasinya pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam aspek kehidupan modern.

C. Uraian Materi

1. Analisis Pengembangan Implementasi Nilai-nilai Pancasila

Analisis pengembangan nilai-nilai Pancasila adalah: mempelajari, mencermati, memaknai, dan memperluas pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini diperlukan dengan tujuan agar Pancasila dapat mengikuti perkembangan zaman (*fleksibel*). Sebab mau tidak mau kita harus menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan teknologi baru akan berdampak pada sikap dan perilaku manusia. Pengembangan nilai-nilai Pancasila ini juga membuktikan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu terbuka menerima hal-hal yang baru untuk pengembangan dan penyesuaian dengan fenomena-fenomena kehidupan di zaman modern ini.

2. Menganalisis Cara-cara Pengembangan Implementasi Nilai-nilai Pancasila

Cara-cara pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila adalah dengan cara mengkaitkan nilai-nilai Pancasila dengan fenomena kehidupan serta penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru. Contoh : pergaulan/ perkenalan lewat *facebook*, zaman sekarang banyak sekali pergaulan para remaja melalui *facebook* yang berakhir positif yaitu: terjadi perkawinan, tetapi juga banyak lewat pergaulan *facebook* terjadi penipuan, pemerkosaan dan kejahatan lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah: apakah perkenalan lewat *facebook* tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai Pancasila menerima fenomena pergaulan di zaman modern tersebut, sebagai pengembangan nilai-nilai.

3. Pengembangan Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Modern

Pengembangan nilai-nilai Pancasila hidup subur dalam pergaulan kehidupan di masyarakat. Tanpa kita sadari sebetulnya kita setiap detik, menit dan jam mengamalkan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh berkat penemuan teknologi yang modern, sekarang ini banyak perdagangan melalui *online*, sistem ini rawan dengan penipuan, modalnya saling percaya antara pembeli dengan penjual, tetapi sistem perdagangan ini lebih efektif, sehingga banyak masyarakat yang melakukan jual beli dengan sistem ini. Yang menjadi pertanyaan apakah Pancasila menerima

fenomena sistem perdagangan ini? Demi pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, hendaknya menerima fenomena sistem perdagangan modern tersebut (bersifat fleksibel).

4. Pengembangan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara Modern

Pada pemerintah sistem demokrasi sekarang ini kehidupan kenegaraan lebih bebas dan terbuka, contohnya: penyadapan oleh KPK, dengan penyadapan tersebut banyak sekali para pejabat yang tertangkap, baik melakukan korupsi, penyuapan, maupun tindak pidana lain, Pancasila menerima tindakan tersebut, teknik ini sebagai contoh pengembangan implementasi Pancasila dalam kehidupan kenegaraan.

Contoh lain pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara adalah: perekaman oleh Makroof Samsudin antara pembicaraan Setya Novanto dengan PT Free Port dan pengusaha yang disebarkan/diajukan Sudirman Said kepada MKD (Jawa Pos, 4 Desember 2015). Perekaman tersebut sekarang sudah terbuka, tidak saja oleh pejabat negara tetapi juga oleh masyarakat, perekaman tersebut sebagai pengembangan nilai Pancasila. Termasuk informasi antara pejabat, atasan dengan bawahannya atau sebaliknya antara bawahan kepada atasannya melalui HP. Sistem penyampaian informasi dengan HP ini ternyata sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sekaligus sebagai pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan negara.

5. Kendala-Kendala Dan Cara Mengatasinya Pengembangan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Aspek Kehidupan Modern

a. Kendala-kendala pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila.

- 1) Kebobrokan moral sebagian bangsa Indonesia, karena kebobrokan moral banyak tindakan negatif yang dilakukan seperti, korupsi, mencuri, menipu, membegal, minuman keras, selingkuh, pemerkosaan dan tindak pidana lain.
- 2) Tingkat pendidikan sebagian besar yang masih rendah, karena tingkat pendidikan yang rendah akibatnya tidak dapat membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan salah, sehingga banyak sikap dan perilaku yang melanggar norma.

- 3) Tingkat ekonomi yang rendah: kemiskinan mengakibatkan kecenderungan orang untuk berbuat jahat, banyak sekali kejahatan dilakukan oleh kelompok masyarakat bawah, karena kesulitan ekonomi.
- 4) Minimnya orang yang menjadi suri teladan dalam bersikap dan berperilaku (*Human modeling*) kalau dalam ajaran Islam Ahli sunah Waljamaah yaitu mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW.
- 5) Bangsa Indonesia kehilangan kepedulian, kehilangan jati diri, dan Kehilangan kehalusan budi, akibatnya sikap dan perilaku bangsa Indonesia sekarang beringas, mudah emosi, dan agresif.
- 6) Terjadi degradasi budi pekerti yang luhur, seperti saling hormat menghormati.

b. Cara mengatasi kendala pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila.

Pencegahan (prefentif) antara lain melalui:

- 1) Pendidikan baik secara formal maupun tidak formal, secara formal melalui pendidikan secara integratif (Purcell, 2003) terutama melalui PPKn dan Pendidikan Agama.
- 2) Melalui pendidikan ekstrakurikuler, seperti Pendidikan Pramuka, dan kegiatan lainnya yang dapat menanamkan sikap dan perilaku positif siswa.
- 3) Pendidikan dan pembinaan di pondok pesantren, panti asuhan, dan jenis kegiatan pendidikan lainnya.
- 4) Pengajian/siraman rohani atau ceramah agama yang banyak dilakukan masyarakat baik lewat media televisi atau majalah keagamaan.
- 5) Peningkatan ekonomi rakyat dengan memberi pelatihan dunia usaha atau membuka lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan (sumber kejahatan karena kemiskinan dan pengangguran).
- 6) Pencontohan sikap dan perilaku pejabat dan tokoh masyarakat dan pejabat negara (*human modeling*, Gagne, 1984).
- 7) Menghidupkan kembali budaya daerah dan nasional untuk pembentukan karakter bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- 8) Memberi dukungan dan memperkuat KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

Tindakan (Represif) antara lain:

- 1) Penangkapan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana dan mengadili tanpa pandang bulu.
- 2) Memberi hukuman sosial bagi yang melanggar norma sosial, moral dan adat istiadat.
- 3) Memenjarakan (memasukan ke LP) supaya sadar akan sikap dan perilakunya.

D. Aktifitas Pembelajaran

1. Bacalah dengan cermat dan pahami modul di atas!
2. Setelah itu diskusikan dengan kelompok Anda (membentuk kelompok)!
3. Presentasikan hasil diskusi tersebut dan kelompok lain menanggapi!
4. Simpulkan isi dan makna modul tersebut dengan kelompok Anda!

E. Latihan dan Tugas

Setelah membaca modul di atas, tugas Anda adalah menjawab pertanyaan di bawah ini.

1. Uraikan dan beri contoh pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan modern!
2. Uraikan dan beri contoh cara-cara pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan modern!
3. Uraikan dan beri contoh pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat modern!
4. Uraikan dan beri contoh pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara modern!
5. Apakah kendala-kendala dan cara mengatasinya pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam aspek kehidupan modern?

F. Rangkuman Materi.

Pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan modern adalah mempelajari, mencermati, dan memperluas pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kaitannya dengan fenomena kehidupan modern

sekarang ini. Cara-cara pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila adalah dengan cara mengkaitkan nilai-nilai Pancasila dengan fenomena kehidupan sebagai dampak penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru.

Pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat adalah pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam pergaulan kehidupan di masyarakat modern. Pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara modern, artinya pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku dalam kehidupan bernegara yang modern. Banyak sekali yang menjadi kendala pengembangan nilai-nilai Pancasila ke arah sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Cara mengatasi kendala tersebut dengan pencegahan (preentif) dan tindakan (represif).

D. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah Anda membaca dan memahami isi modul ini tuliskan bagaimana melakukan pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pendidikan.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PEMBUKAAN DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Disusun Dr. Suwarno, M.H.

A. Tujuan

Tujuan yang diharapkan setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat:

1. Menganalisis pengembangan implementasi nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik.
2. Menganalisis cara-cara pengembangan implementasi nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik.
3. Menganalisis pengembangan implementasi nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik.
4. Menganalisis pengembangan implementasi nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bernegara dengan baik.
5. Menganalisis kendala-kendala dan cara mengatasinya pengembangan implementasi nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam semua aspek kehidupan dengan baik.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menganalisis pengembangan implementasi nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Menganalisis cara-cara pengembangan implementasi nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Menganalisis pengembangan implementasi nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Menganalisis pengembangan implementasi nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bernegara.
5. Menganalisis kendala-kendala dan cara mengatasinya pengembangan implementasi nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam semua aspek kehidupan.

C. Uraian Materi

1. Pengembangan Implementasi Nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Pengimplementasian nilai-nilai dan moral pembukaan dan UUD 1945 harus selalu mengalami perkembangan, karena nilai dan moral sifatnya tidak statis melainkan dinamis, yakni selalu mengikuti perkembangan zaman yang semakin hari semakin kompleks saja permasalahan yang dihadapi. Pembuat Undang-undang sendiri juga menyatakan kalau undang-undang pasti akan berubah, jika seperti itu maka nilai dan moral yang terkandung di dalamnya pun akan berubah. Tentunya perkembangan ini diharapkan ke arah yang positif, yang bisa memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengembangan implementasi nilai dan moral bisa menuju ke arah yang lebih baik jika warga negara dan pemerintah bekerja sama bahu-membahu untuk mewujudkan cita-cita yang luhur dari undang-undang itu sendiri. Terciptanya bangsa yang berbudaya melalui jalan implementasi nilai dan moral yang terkandung dalam UUD 1945 tidak akan terwujud tanpa adanya kerukunan dan sikap saling menghargai antar sesama, tidak ada sikap saling menghina dan merendahkan orang lain. Hal ini seperti bunyi sila Pancasila yang ketiga yang berbunyi "persatuan Indonesia" yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Semboyan Bhineka Tunggal Ika juga senantiasa mengingatkan agar menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi persatuan.

2. Menganalisis Cara-cara Pengembangan Implementasi Nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Cara-cara yang dapat ditempuh untuk dapat mengembangkan nilai dan moral yang terkandung dalam pembukaan dan undang-undang dasar 1945 di antaranya adalah: (a) sikap saling menghargai, (b) menghormati perbedaan, (c)

saling menghormati, (d) tolong menolong, (e) bersatu menjaga keamanan negara, (f) mendahulukan kepentingan bersama, (g) melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya, (h) cinta tanah air.

3. Menganalisis Pengembangan Implementasi Nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Kehidupan Bermasyarakat

Pengembangan nilai dan moral yang terkandung dalam Pembukaan Dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting dan mendesak sifatnya untuk dilaksanakan. Masyarakat merupakan organisasi kecil yang mendukung terbentuknya sebuah negara. Jika dalam masyarakat tidak lagi menganut nilai dan moral yang terkandung dalam Pembukaan dan Undang-undang Dasar 1945 niscaya negara tersebut akan mengalami kehancuran secara perlahan, begitu juga sebaliknya jika masyarakat suatu negara adalah masyarakat yang bermoral dan beradab akan membuat negara menjadi tangguh dan siap untuk mensejajarkan diri dengan negara yang lain.

Pengembangan nilai pembukaan undang-undang dasar 1945 bisa kita lakukan dengan cara mengamalkan sikap-sikap yang sesuai dengan setiap sila yang terkandung dalam Pancasila, yakni:

- a. Sila ke I: menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
- b. Sila ke II: saling tolong-menolong dan menghargai dengan sesama manusia.
- c. Sila ke III: menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
- d. Sola ke IV: memutuskan segala sesuatu atas dasar kepentingan bersama.
- e. Sila ke V: menetapkan keadilan tidak pandang bulu siapapun yang salah harus diadili sesuai dengan ketentuan peradilan yang berlaku.

4. Menganalisis Kendala-kendala dan Cara Mengatasi Pengembangan Implementasi Nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Semua Aspek Kehidupan

Kendala-kendala yang sering muncul adalah pada implementasinya adalah sebagai berikut: (a) sikap acuh terhadap sesama, (b) mendahulukan kepentingan kelompok, (c) kesetiaan pada kelompok tertentu, (d) anarkisme, (e) himpitan ekonomi, (f) kurangnya toleransi.

D. Aktivitas Pembelajaran

Model pembelajaran *problem based learning* ini bertujuan merangsang peserta untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya melalui langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:

1. Mengorientasi peserta pada masalah. Tahap ini untuk memfokuskan peserta mengamati masalah yang menjadi objek pembelajaran.
2. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran salah satu kegiatan agar peserta menyampaikan berbagai pertanyaan (atau menanya) terhadap masalah kajian.
3. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada tahap ini peserta melakukan percobaan (mencoba) untuk memperoleh data dalam rangka menjawab atau menyelesaikan masalah yang dikaji.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta mengasosiasi data yang ditemukan dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber.
5. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Setelah peserta mendapat jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan dievaluasi.

E. Latihan/Kasus/Tugas

Sebutkan peranan nilai-nilai konstitusi bagi sebuah negara!

F. Rangkuman

Pengembangan nilai dan moral yang terkandung dalam pembukaan dan undang-undang dasar 1945 dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting dan mendesak sifatnya untuk dilaksanakan. Masyarakat merupakan organisasi kecil yang mendukung terbentuknya sebuah negara. Jika dalam masyarakat tidak lagi menganut nilai dan moral yang terkandung dalam Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 niscaya negara tersebut akan mengalami kehancuran secara perlahan begitu juga sebaliknya jika masyarakat suatu negara adalah masyarakat yang bermoral dan beradab akan membuat negara menjadi tangguh dan siap untuk menyejajarkan diri dengan negara yang lain.

Cara-cara yang dapat ditempuh untuk dapat mengembangkan nilai dan moral yang terkandung dalam pembukaan dan undang-undang dasar 1945 di antaranya adalah: sikap saling menghargai, saling menghormati, tolong menolong, bersatu menjaga keamanan negara, mendahulukan kepentingan bersama, melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya, cinta tanah air.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu ?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pembelajaran ini?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI NASIONALISME DAN PATRIOTISME

Disusun Dr. Suwarno, M.H.

A. Tujuan

Adapun tujuan dalam kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu:

1. Menganalisis pengembangan implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dengan baik.
2. Menganalisis cara-cara pengembangan implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme secara solutif.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menganalisis pengembangan implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme.
2. Menganalisis cara-cara pengembangan implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme.

C. Uraian Materi

1. Pengembangan Implementasi Nilai-nilai Nasionalisme dan Patriotisme

Upaya memupuk nasionalisme agar tidak rentan, mudah pudar dan bahkan terkikis habis dari “dada bangsa Indonesia” tentu perlu keseriusan dan optimisme. Ada sasanti di beberapa lembaga pendidikan yang mungkin pernah kita dengar atau dilihat, bahwa dalam rangka kaderisasi calon-calon pemimpin bangsa, hendaknya terus dimantapkan “dwi warnapurwa – cendekia wusana”.

Walaupun pengaruh globalisasi “mendera” dan “melarutkan” apa saja yang ada di muka bumi ini, tentu tidak boleh larut dan tersapu semua nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme tersebut. Oleh sebab itu yang perlu dipupuk pada dasarnya adalah jati diri Bangsa Indonesia. Beberapa esensi jati diri antara lain: (a) bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang dan anti penjajah, (b) bangsa Indonesia cinta damai dan lebih cinta kemerdekaan, (c) sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya luhur ramah dan bersahabat, (d) kesetaraan dan kemandirian perlu dipupuk terus untuk mengejar ketinggalan.

Selain hal-hal normatif dan mendasar yang masih menuntut aktualisasi dan representasi tersebut, terdapat juga komitmen dan tekad baru yang kini tampak sebagai “*trend*” dan fenomena cemerlang untuk memelihara nasionalisme.

Pertama, keunggulan kompetitif sumber daya manusia (SDM). Sebenarnya tidak kurang bibit unggul dan kader potensial dari putra-putri Indonesia yang kelak diharapkan dapat menjadi patriot-patriot pembangunan dan mampu membawa Indonesia ke pintu gerbang kegemilangan dan kejayaan. Berbagai sekolah unggulan dan lulusan pendidikan di dalam maupun di luar negeri terbukti cukup apresiatif dan bahkan telah mampu menjuarai berbagai olimpiade sains dan teknologi. Putra-putri seperti inilah yang bisa membagi kebanggaan. Tidak sedikit manager muda berbakat pada lembaga pemerintah ataupun swasta dengan menampilkan kepiawaian manajemen. Hal ini tentu dapat memberikan semangat kepada generasi baru yang akan datang lebih dapat memacu diri untuk berprestasi dan bangga akan teman-teman sebangsanya.

Kedua, Pluralitas yang menghasilkan sinergisme. Kemajemukan bangsa Indonesia yang kian hari kian terbentuk secara alami dan menuju pada sikap inklusif dari berbagai suku agama, ras dan golongan, akan terus berkembang pesat dan bahkan tak mungkin dihambat. Kecenderungan masa kini dan di masa yang akan datang integrasi bangsa Indonesia tidak lagi terfokus pada faktor suku, agama, ras dan golongan tersebut, tetapi lebih mengarah pada integrasi dan sinergi yang lebih maju, yakni berkaitan dengan peran, fungsi dan profesi orang per orang maupun dalam hubungan kelompok. Di masa yang akan datang orang tidak lagi bertanya “kamu dari mana, suku apa, dan agamanya apa?” tetapi lebih banyak pada pertanyaan “kamu memiliki kemampuan dan skill apa atau keahlian dan profesi apa,” yang bisa diajak bekerja sama untuk menghasilkan suatu karya. Disini akan tersirat sikap dan sifat-sifat saling memberi dan saling menerima segala macam perbedaan yang pada muaranya akan dapat melahirkan rasa bangga dan nasionalisme yang luas.

Ketiga, semangat tidak kenal menyerah dan tahan uji. Ada berbagai ungkapan dan perasaan sebagian besar bangsa Indonesia yang tetap tahan uji dan cukup membanggakan. Berbagai musibah bencana dan malapetaka terus datang silih berganti, seperti yang kita rasakan datangnya “tsunami”, tanah longsor, bencana banjir, flu burung, demam berdarah, busung lapar dan lain

sebagainya namun tetap membuat kita tawakal dan berusaha untuk mengatasi secara bergotong royong.

Keempat, semangat demokrasi menjadi pilihan bersama. Era demokratisasi, sudah membangkitkan tekad dan semangat baru bagi bangsa Indonesia untuk menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih bermartabat. Negara demokrasi sebagai pilihan tepat karena dari sinilah akan lahir bingkai-bingkai sehat, dimana orang-orang bersepakat dan bersama-sama dalam menentukan pilihan bersama. Dengan demikian tata kehidupan berdemokrasi inilah yang akan menjadi semangat baru dan semangat bersama generasi penerus bangsa Indonesia yang sekaligus akan menjadi semangat nasionalisme yang kental dalam era yang baru.

Kelima, semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan Pemerintah dalam upaya desentralisasi kekuasaan kepada daerah-daerah dan memberikan otonomi yang luas kepada tiap-tiap daerah, akan melahirkan semangat kebebasan dan semangat kemandirian untuk membangun daerahnya masing-masing. Ada kompetisi di dalamnya, tetapi juga tuntutan kreativitas di masing-masing daerah untuk lebih maju dan semakin dapat mensejahterakan masyarakatnya. Desentralisasi tidak boleh mengarah pada federalisme apalagi memecah belah integrasi nasional. Otonomi daerah juga tidak boleh mengarah kepada disintegrasi bangsa. Oleh karena itu rambu-rambu untuk tetap dapat menjaga utuhnya NKRI harus dipahami bersama dan didasari oleh semangat demokrasi, integralistik dan wawasan kebangsaan Indonesia yang lebih mendalam.

D. Aktivitas Pembelajaran

Model pembelajaran *project based learning* bertujuan untuk pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta dalam melakukan investigasi dan memahami pembelajaran melalui investigasi, membimbing peserta dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam kurikulum, memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menggali konten (materi) dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya, dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Langkah pembelajaran dalam *project based learning* adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Tahap ini sebagai langkah awal agar peserta mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada.
2. Mendesain perencanaan proyek. Sebagai langkah nyata menjawab pertanyaan yang ada disusunlah suatu perencanaan proyek bisa melalui percobaan.
3. Menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Penjadwalan sangat penting agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia dan sesuai dengan target.
4. Memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Mentor/fasilitator melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan perkembangan proyek. Mentor/fasilitator mengevaluasi proyek yang sedang dikerjakan.
5. Menguji hasil. Fakta dan data percobaan atau penelitian dihubungkan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber.
6. Mengevaluasi kegiatan/pengalaman. Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan sebagai acuan perbaikan untuk tugas proyek pada mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran lain.

E. Latihan/Kasus/Tugas

Deskripsikan esensi dari jati diri yang melatarbelakangi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme!

F. Rangkuman

Upaya memupuk nasionalisme agar tidak rentan, mudah pudar dan bahkan terkikis habis dari “dada bangsa Indonesia” tentu perlu keseriusan dan optimisme. Ada sasanti di beberapa lembaga pendidikan yang mungkin pernah kita dengar atau dilihat, bahwa dalam rangka kaderisasi calon-calon pemimpin bangsa, hendaknya terus dimantapkan “dwi warnapurwa – cendekia wusana”. Secara sepintas inti maksudnya adalah untuk menciptakan kader-kader pemimpin bangsa ini, agar memiliki rasa dan jiwa nasionalisme yang tinggi dan serta berpikir cerdas dan patriotik. Merah putih lebih dulu, baru kecakapan intelektualitas dan kecendekiawanan yang tinggi untuk melengkapinya. Tidak kita inginkan di masa datang banyak pemimpin kita cakap dan cerdas tetapi tidak

memiliki jiwa kejuangan atau mentalnya lemah. Walaupun pengaruh globalisasi “mendera” dan “melarutkan” apa saja yang ada di muka bumi ini, tentu tidak boleh larut dan tersapu semua nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme tersebut. Oleh sebab itu yang perlu dipupuk pada dasarnya adalah jati diri bangsa Indonesia.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah mengikuti proses belajar mengajar, tugas Anda menyusun program sekolah untuk mengembangkan, mengamalkan serta membudayakan nilai-nilai nasionalisme dalam rangka membangun kesatuan dan persatuan bangsa kepada peserta didik.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA DI INDONESIA

Disusun Dr. Didik Sukriono, S.H., M.Hum.

A. Tujuan

Tujuan dalam kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat menyimpulkan hasil analisis permasalahan implementasi *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia sesuai konsep dan fakta.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Menyimpulkan hasil analisis permasalahan implementasi *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia.

C. Uraian Materi

1. Kesimpulan Hasil Analisis

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan *clean and good governance*. Untuk mencapai *good governance* dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan, prinsip-prinsip tersebut meliputi: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli dan stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Sehingga apa yang didambakan Indonesia menjadi negara yang *clean and good governance* dapat terwujud dan hilangnya faktor-faktor kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai. Masyarakat dan pemerintah yang masih bertolak belakang untuk mengatasi masalah tersebut seharusnya menjalin harmonisasi dan kerjasama mengatasi masalah-masalah yang ada. *Good governance*

sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik tercermin dalam berbagai bidang yang memiliki peran yang penting dalam gerak roda pemerintahan di Indonesia yang meliputi: bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum.

Upaya mewujudkan *good governance*, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi pemerintahan yang baik (*good governance*) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik.

Pemerintah perlu menyusun Standar Pelayanan bagi setiap instansi pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Deregulasi dan Debirokratisasi mutlak harus terus menerus dilakukan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar pelayanan publik senantiasa memuaskan masyarakat. Ada lima cara perbaikan di sektor pelayanan publik yang patut dipertimbangkan: Mempercepat terbentuknya UU Pelayanan Publik, Pembentukan pelayanan publik satu atap (*one stop services*), Transparansi biaya pengurusan pelayanan publik, Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), dan reformasi pegawai yang berkecimpung di pelayanan publik. Terselenggaranya pelayanan publik yang baik, memberikan indikasi membaiknya kinerja manajemen pemerintahan, di sisi lain menunjukkan adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh terhadap perubahan yang lebih baik terhadap sikap mental dan perilaku aparat pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

2. Saran dan Rekomendasi

Berbagai permasalahan nasional menjadi alasan belum maksimalnya *good governance*. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip

good governance maka tiga pilarnya yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil saling menjaga, support dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan. Terutama antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting tercapainya *good governance*. Tanpa *good governance* sulit bagi masing-masing pihak untuk dapat saling berkontribusi dan saling mengawasi.

Good governance tidak akan bisa tercapai apabila integritas pemerintah dalam menjalankan pemerintah tidak dapat dijamin. Hukum hanya akan menjadi bumerang yang bisa balik menyerang negara dan pemerintah menjadi lebih buruk apabila tidak dipakai sebagaimana mestinya. Konsistensi pemerintah dan masyarakat harus terjamin sebagai wujud peran masing-masing dalam pemerintah. Setiap pihak harus bergerak dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran ini menggunakan metode pendekatan studi kasus dengan menyajikan kejadian situasi konflik atau dilema. Peserta dibagi dua kelompok untuk menganalisis masalah berdasarkan fakta kasus untuk menghasilkan keputusan. Adapun langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut:

1. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok melakukan analisis/kajian terhadap permasalahan implementasi *good governance* di Indonesia. Analisis/kajian disertai dengan kasus/fakta yang menunjukkan permasalahan, dikorelasikan dengan konsep/teori/idealnya, kesimpulan, saran dan rekomendasi.
2. Setelah terbentuk kelompok, masing-masing kelompok menunjuk wakil dari kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.
3. Setelah presentasi selesai, kelompok lain dapat menanggapi, memberi saran dan masukan terhadap hasil kerja kelompok presenter.
4. Mentor/fasilitator memberikan klarifikasi dan penguatan.
5. Di akhir sesi, perwakilan dari masing-masing kelompok memberi kesimpulan.

Pendekatan ini akan mendorong peserta diklat untuk mengajukan pertanyaan, menetapkan komponen-komponen yang dianggap penting dalam situasi; menganalisis, menyimpulkan, dan membandingkan serta mempertentangkan komponen-komponen tersebut; dan membuat penilaian terhadap kasus tersebut. Singkatnya, peserta melaksanakan semua jenjang berpikir dari tingkatan yang paling sederhana (*recall*) hingga tingkatan yang paling tinggi (*evaluation*).

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Penurunan kinerja dan sumber daya manusia para aparatur pemerintah menjadi salah satu penghambat dalam mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan negara. Tugas Anda menuliskan solusi dari permasalahan tersebut!

F. Rangkuman

Untuk mencapai *good governance* dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan, prinsip-prinsip tersebut meliputi: Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli dan stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Pemerintah perlu menyusun Standar Pelayanan bagi setiap instansi pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Deregulasi dan Debirokratisasi mutlak harus terus menerus dilakukan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar pelayanan publik senantiasa memuaskan masyarakat.

Good governance tidak akan bisa tercapai apabila integritas pemerintah dalam menjalankan pemerintah tidak dapat dijamin. Hukum hanya akan menjadi bumerang yang bisa balik menyerang negara dan pemerintah menjadi lebih buruk apabila tidak dipakai sebagaimana mestinya. Konsistensi pemerintah dan masyarakat harus terjamin sebagai wujud peran masing-masing dalam pemerintah. Setiap pihak harus bergerak dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, tugas Anda mengidentifikasi apakah penyelenggaraan di sekolah/institusi Anda sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 5 PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

Disusun Dr. Suwarno, M.H.

A. Tujuan

Tujuan dalam kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat:

1. Menganalisis pengembangan implementasi penegakan hukum dan peradilan nasional dengan baik.
2. Menganalisis jenis-jenis pengembangan implementasi penegakan hukum dan peradilan nasional dengan baik.
3. Menganalisis cara-cara pengembangan implementasi penegakan hukum dan peradilan nasional dengan baik.
4. Menganalisis kondisi implementasi pengembangan hukum dan peradilan di Indonesia saat ini dengan baik.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menganalisis pengembangan implementasi penegakan hukum dan peradilan nasional.
2. Menganalisis jenis-jenis pengembangan implementasi penegakan hukum dan peradilan nasional.
3. Menganalisis cara-cara pengembangan implementasi penegakan hukum dan peradilan nasional.
4. Menganalisis kondisi implementasi pengembangan hukum dan peradilan di Indonesia saat ini.

C. Uraian Materi

1. Pengembangan Implementasi Penegakan Hukum Dan Peradilan Nasional

Implementasi penegakan hukum dan peradilan nasional sangat perlu untuk dikembangkan ditengah-tengah dinamika ekonomi glabal dunia yang dampaknya cukup besar terhadap kehidupan dalam semua aspek khususnya di bidang hukum. Berbagai fenomena-fenomena sosial yang telah berkembang dalam

masyarakat, akhirnya menjadi fenomena hukum. Untuk mengimbangi dinamika global dunia tersebut diperlukan pengembangan kualitas manusia, khususnya kualitas penegak hukum. Pengembangan penegakan hukum juga harus ditujukan ke arah yang lebih positif. Mengingat citra hukum dan peradilan nasional dimata masyarakat mengalami penurunan. Maka pengembangan hukum dan peradilan nasional sifatnya sangat urgen untuk segera dilaksanakan.

Penundaan terhadap pengembangan implementasi penegakan hukum dan peradilan nasional bisa berakibat kebobrokan yang cukup besar ditubuh penegak hukum dan peradilan. Dalam hal ini masyarakat akan semakin tidak percaya dengan hukum dan peradilan nasional. Lenturnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan nasional bisa berakibat dan memicu naiknya tindak kriminalitas yang ada di negara ini. Adapun pengembangan implementasi ini bisa dilakukan pada semua lini yang berperan aktif dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan nasional. Memang tidak mudah akan tetapi tetap harus dicoba guna terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh amanah Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (NKRI).

2. Jenis-jenis Pengembangan Implementasi Penegakan Hukum Dan Peradilan Nasional

Pengembangan implementasi penegakan hukum dan peradilan nasional bisa dilakukan dari berbagai aspek, seperti yang dikemukakan sebelumnya, jadi tidak akan dijelaskan lagi secara panjang lebar. Aspek-aspek tersebut adalah: aspek penegak hukum, hukum itu sendiri, perundang-undangan, dan masyarakat.

3. Cara-cara Pengembangan Implementasi Penegakan Hukum dan Peradilan Nasional

Cara-cara yang dapat ditempuh untuk mengembangkan implementasi penegakan hukum dan peradilan nasional adalah dengan memperbaiki segala sesuatu yang terkait dengan hukum dan peradilan nasional. Hukum dan peradilan nasional tidak akan lepas dari yang menjalankan tugas dan amanat yakni para aparat penegak hukum juga warga negara yang senantiasa

bersentuhan dengan proses hukum dan peradilan. Untuk itu diperlukan suatu kesadaran moral yang tinggi setiap komponen bangsa, khususnya para aparat penegak hukum. Kesadaran dapat dibangun dari dua (2) unsur, yakni aparat penegak hukum dan warga negara yang membutuhkan keadilan hukum tidak bisa dipungkiri. Karena kalau hanya berjalan salah satu unsur saja niscaya tidak akan pernah berhasil. Patuh pada hukum dan peradilan nasional dijalankan oleh aparat saja juga tidak mungkin dapat terjadi, sebaliknya jika hanya warga negara saja yang patuh terhadap hukum dan peradilan nasional juga tidak mungkin berhasil. Jadi bagaimanapun persatuan dan kesatuan senantiasa mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan segala yang dicita-citakan, tidak terkecuali dengan masalah hukum dan peradilan nasional.

4. Kondisi Implementasi Pengembangan Hukum dan Peradilan di Indonesia saat ini

Implementasi pengembangan hukum dan peradilan di Indonesia saat ini belum mengalami kemajuan yang berarti. Dikatakan demikian karena saat ini kondisi hukum dan peradilan nasional sangat mengkhawatirkan. Bahkan seperti yang dikemukakan sebelumnya hukum dan peradilan di negara ini bisa dibeli, hukum dan peradilan di negara ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Oleh sebab itu diperlukan kerja keras dan tuntas kerja untuk dapat mengembalikan fungsi hukum yang sesuai, sehingga negara ini bisa menjadi negara yang bersatu, adil, dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan demikian ke depan hukum dan peradilan di Indonesia perlu diadakan pengembangan atau reformasi disegala bidang seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya.

D. Aktivitas Pembelajaran

Model Pembelajaran *Problem Based Learning* ini bertujuan merangsang peserta untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya melalui langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:

1. Mengorientasi peserta pada masalah yaitu dengan memfokuskan peserta mengamati masalah yang menjadi objek pembelajaran.

2. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran dengan menyampaikan berbagai pertanyaan (atau menanya) terhadap masalah kajian.
3. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok dengan melakukan percobaan (mencoba) untuk memperoleh data dalam rangka menjawab atau menyelesaikan masalah yang dikaji.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, peserta mengasosiasi data yang ditemukan dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber.
5. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah dilakukan setelah peserta mendapat jawaban terhadap masalah yang ada.

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Analisislah kasus main hakim sendiri dalam masyarakat berdasarkan ketentuan KUHP dan susunlah pemecahan (solusi) dari kasus tersebut!

F. Rangkuman

Implementasi penegakan hukum dan peradilan nasional sangat perlu untuk dikembangkan mengikuti perkembangan zaman yang melaju dengan semakin pesat. Pengembangan penegakan hukum juga harus ditujukan ke arah yang lebih positif. Mengingat citra hukum dan peradilan nasional di mata masyarakat mengalami penurunan. Cara-cara yang dapat ditempuh untuk mengembangkan implementasi penegakan hukum dan peradilan nasional adalah dengan memperbaiki segala sesuatu yang terkait dengan hukum dan peradilan nasional. Hukum dan peradilan nasional tidak akan lepas dari yang menjalankan tugas dan amanat yakni para aparat penegak hukum juga warga negara yang senantiasa bersentuhan dengan proses hukum dan peradilan. Implementasi pengembangan hukum dan peradilan di Indonesia saat ini belum mengalami kemajuan yang berarti. Dikatakan demikian karena saat ini kondisi hukum dan peradilan nasional sangat mengkhawatirkan. Bahkan seperti yang dikemukakan sebelumnya hukum dan peradilan di negara ini bisa dibeli, hukum dan peradilan di negara ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pembelajaran ini?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 6

ANALISIS PERMASALAHAN IMPLEMENTASI

KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA KESATUAN

REPUBLIK INDONESIA

Disusun Diana Wulandari, S.Pd.

A. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat:

1. Mendiskusikan permasalahan dalam implementasi kesadaran berbangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia sesuai fakta.
2. Mendiskusikan metode analisis permasalahan sesuai konsep.
3. Menganalisis permasalahan dalam implementasi kesadaran berbangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan metode-metode analisis permasalahan sesuai fakta dan konsep.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi dalam modul ini adalah:

1. Mendiskusikan permasalahan dalam implementasi kesadaran berbangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia.
2. Mendiskusikan metode analisis permasalahan.
3. Menganalisis permasalahan dalam implementasi kesadaran berbangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia.

C. Uraian Materi

1. Permasalahan dalam Implementasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kesatuan Republik Indonesia

Kesadaran berbangsa dan bernegara masa sekarang sangat berbeda dengan kesadaran pada masa pergerakan nasional, serta pada waktu memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kondisi bangsa saat ini memperlihatkan penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Maraknya konflik vertikal dan horizontal yang terjadi di Indonesia menunjukkan gejala kesadaran berbangsa dan bernegara yang belum baik. Perilaku individu maupun pejabat masih menunjukkan tindakan-tindakan

yang melanggar kaidah hukum, seperti mafia hukum, merusak hutan, pencemaran lingkungan, tindak kriminalitas, lebih mementingkan diri dan golongan, korupsi, etnisitas yang berlebihan, bertindak anarkis, penggunaan narkoba, kurang menghargai budaya bangsa sendiri, dan lebih mencintai produk luar negeri.

Nilai kebangsaan Indonesia saat ini yang diwarnai penonjolan sikap primordial antardaerah dan semangat otonomi daerah yang agak menyimpang dari semangat kebangsaan telah memunculkan gerakan-gerakan separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan sebagainya. Kondisi ini disertai pula dengan munculnya aksi-aksi teror, tindakan-tindakan radikal dan anarkhis dari kelompok-kelompok tertentu yang fanatik terhadap paham/ajaran kelompoknya. Fenomena perkelahian antarwarga, antarpelajar, bahkan antarelit politik pun sering menjadi sorotan media.

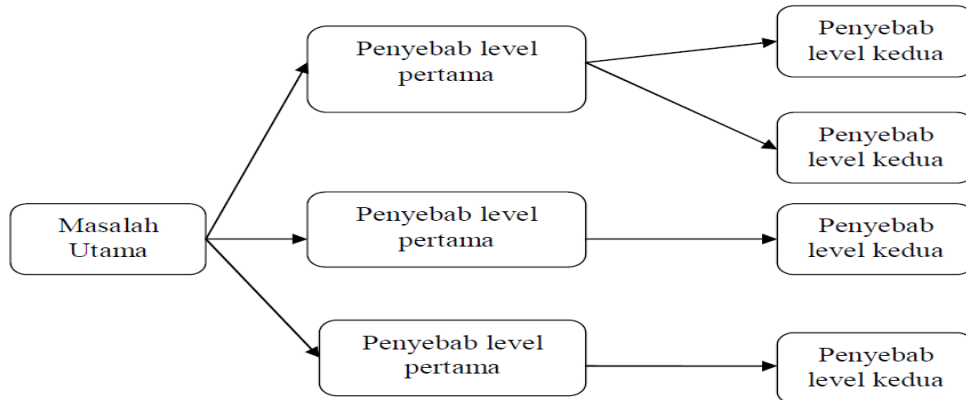
Degradasi kesadaran berbangsa dan bernegara juga tampak pada perilaku mayoritas kaum muda yang mengalami krisis etika perilaku, minim dalam menghormati nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan lebih bangga dengan budaya atau simbol-simbol bangsa lain, dan semakin individualisnya kaum muda di tengah-tengah masyarakat. Tidak sedikit remaja yang melakukan perilaku menyimpang seperti penggunaan obat terlarang, melakukan *free sex*, terlibat dalam geng motor, dan sebagainya. Kondisi ini diperparah dengan minimnya kesadaran sosial dan perhatian orang tua terhadap anaknya. Ada kecenderungan kesalahan pola pikir orang tua yang menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya ke instansi sekolah. Di sisi lain kondisi lingkungan masyarakat tidak mendukung bagi sosialisasi generasi muda. Masyarakat mengalami pergeseran nilai ke arah gaya hidup yang cenderung materialistik, konsumtif, hedonis, dan *glamor*.

2. Metode-Metode Analisis Permasalahan

a. *Problem Tree Analysis* (Analisis Pohon Masalah).

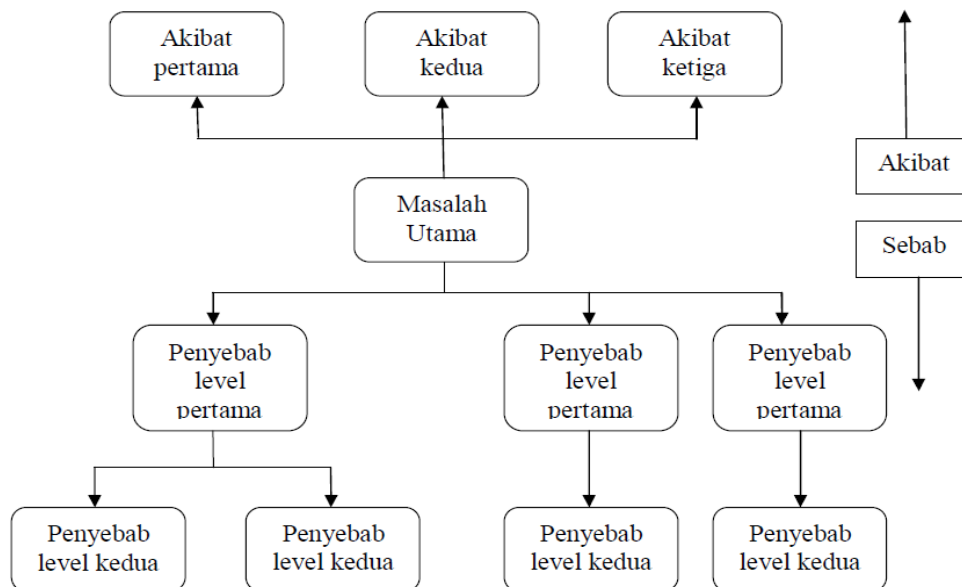
Ada 2 (dua) model dalam penyusunan analisis pohon masalah. Pertama, pohon masalah dibuat dengan cara menempatkan masalah utama pada sebelah kiri dari gambar. Selanjutnya, penyebab munculnya persoalan tersebut ditempatkan pada sebelah kanannya (arah alur proses dari kiri ke kanan). Format

penyusunan pohon masalah model pertama ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Pohon Masalah Model Pertama

Model kedua, pohon masalah dibuat dengan cara menempatkan masalah utama pada titik sentral atau di tengah gambar. Selanjutnya, penyebab munculnya persoalan tersebut ditempatkan di bagian bawahnya (alur ke bawah) dan akibat dari masalah utama ditempatkan di bagian atasnya (alur ke atas). Format penyusunan pohon masalah Model Kedua ini dapat digambarkan pada Gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Pohon Masalah Model Kedua

b. The Method of Root Cause Analysis and Solutions (MRCAS) atau Metode Analisis Akar Masalah dan Solusi (MAAMS)

Merupakan suatu teknik untuk mengidentifikasi semua penyebab masalah dalam suatu fakta/peristiwa/kejadian tertentu, untuk selanjutnya ditentukan akar penyebab utama dan solusi mengatasinya.

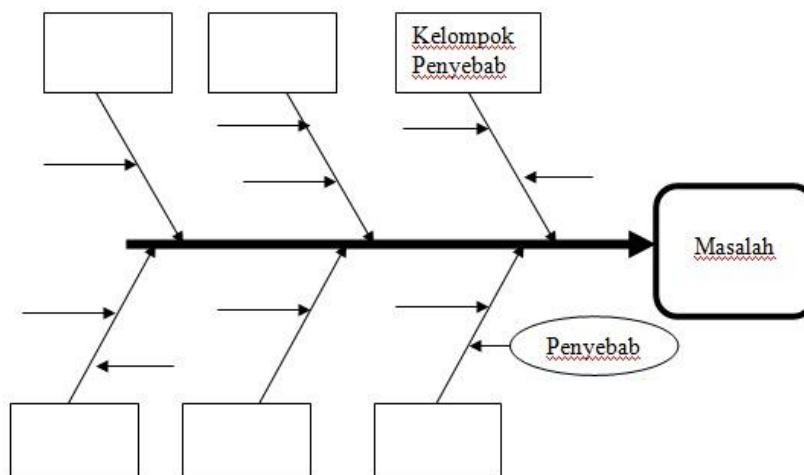
Gambar 3. Contoh Penerapan Metode MAAMS dalam Kasus Tawuran Antar Pelajar.

Sebab a1	Sebab b1	Sebab c1	Sebab d1
Perhatian orang tua (komunikasi) rendah.	Kadar moral/agama pelajar rendah.	Lingkungan sekolah rawan.	"Pembudayaan" kekerasan di media massa.
Sebab a2	Sebab b2	Sebab c2	Sebab d2
Orang tua terlalu sibuk (untuk mencukupi kebutuhan, dsb)	Pendidikan/pengajaran moral/agama kurang memadai, tidak sesuai dengan praktik.	Berdekatkan dengan pusat keramaian: mall, dsb. (Semula jauh)	Komersialisasi dan komodifikasi informasi kejahatan dan hiburan yang mengandung kekerasan.
Sebab a3	Sebab b3	Sebab c3	Sebab d3
Gaji orang tua (terutama PNS) kurang memadai	Guru tidak bisa diteladani (terima suap, "jual nilai")	Aparatnya kolusi dengan pengusaha. Tata ruang diubah semuanya.	Lemahnya (mekanisme) kontrol terhadap isi siaran media massa.
Sebab a4	Sebab b4	Sebab c4	Sebab d4
Anggaran gaji PNS kecil (APBN minim)	Kesejahteraannya rendah, anggaran untuk gaji guru PNS kecil (APBN minim).	1. Gaji aparat rendah. 2. Kontrol dan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan sangat terbatas	Kontrol dan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan sangat terbatas
Sebab a5	Sebab b5	Sebab c5	Sebab d5
Pajak yang terkumpul hanya dari sekitar 50% wajib pajak (temuan Hussein Kartasasmita, rubrik pajak, 1994). Sebagian sisanya digelapkan.	Pajak yang terkumpul hanya dari sekitar 50% wajib pajak (temuan Hussein Kartasasmita, rubrik pajak, 1994). Sebagian sisanya digelapkan.	1. Pajak yang terkumpul hanya dari sekitar 50% wajib pajak (temuan Hussein Kartasasmita, rubrik pajak, 1994). Sebagian sisanya digelapkan. 2. Sistem demokrasinya, sadar atau tidak, dirancang oligarkhis.	Ada semacam kesengajaan pada pembuat keputusan, agar terdapat celah untuk "main-main" kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok.
Sebab a6	Sebab b6	Sebab c6	Sebab d6
1. Korupsi Harta melalui Tahta 2. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh-mewujud) tentang yang benar dan baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) tahta.	1. Korupsi Harta melalui Tahta 2. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh-mewujud) tentang yang benar dan baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) tahta.	1. Korupsi Harta dan Tahta 2. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh-mewujud) tentang yang benar & baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) harta + tahta.	1. Korupsi Tahta demi Harta atau Tahta lainnya. 2. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh-mewujud) tentang yang benar dan baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) harta + tahta.

Langkah-langkah menjalankan MAAMS:

- 1) Rumuskan suatu masalah dalam bentuk yang dapat diajukan pertanyaan “apa sebab-sebabnya.”
- 2) Identifikasi sebab-sebab negatif yang paling langsung dari permasalahan.
- 3) Mencari sebab-sebab dari setiap sebab pada tahap pertama
- 4) Mencari solusi baik yang sifatnya darurat/permukaan/jangka pendek, tanggung/jangka menengah, dan dasar/jangka panjang.

c. Fishbone diagram (diagram tulang ikan)



Gambar 4. Diagram Tulang Ikan.

Langkah-langkah analisis permasalahan Fishbone diagram:

1) Menyepakati pernyataan masalah

Sepakati sebuah pernyataan masalah (*problem statement*). Pernyataan masalah ini diinterpretasikan sebagai “effect”, atau secara visual dalam *fishbone* seperti “kepala ikan”.

2) Mengidentifikasi kategori-kategori

Dari garis horisontal utama, buat garis diagonal yang menjadi “cabang”. Setiap cabang mewakili “sebab utama” dari masalah yang ditulis. Sebab ini diinterpretasikan sebagai “cause”, atau secara visual dalam *fishbone* seperti “tulang ikan”.

3) Menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming

Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi *brainstorming*. Sebab-sebab ditulis dengan garis horisontal sehingga banyak “tulang” kecil keluar dari garis diagonal.

4) Langkah 4: Mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin

Lingkarilah sebab yang tampaknya paling mungkin pada *fishbone diagram*.

d. Metode Pemecahan Masalah (*Problem Solving Method*)

Penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui prosedur, sebagai berikut (David Johnson dan Johnson dalam W.Gulo 2002 : 117):

1. Mendefinisikan masalah.
2. Mendiagnosis masalah dengan membentuk kelompok dengan mendiskusikan sebab-sebab timbulnya masalah, dan menganalisis penyebab yang potensial.
3. Merumuskan alternatif strategi. Pada tahap ini kelompok mencari dan menemukan berbagai alternatif tentang cara penyelesaian masalah (tahap mengidentifikasi solusi alternatif). Untuk itu kelompok harus kreatif, berpikir *divergen*, memahami pertentangan di antara berbagai ide, dan memiliki daya temu yang tinggi.
4. Menentukan strategi.
5. Implementasi dan monitoring strategi. Alternatif/solusi/program yang sudah diterapkan dilakukan monitoring dengan mengevaluasi keberhasilan strategi.

e. Analisis SWOT.

Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) untuk selanjutnya dapat ditentukan strategi yang tepat di setiap komponen tersebut. Kelima metode-metode tersebut dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan implementasi kesadaran berbangsa dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia.

	POSITIF		NEGATIF	
	KEKUATAN		KELEMAHAN	
I N T E R N A L	1		1	
	2		2	
	3		3	
	4		4	
	5		5	
	6		6	
	7		7	
E K S T E R N A L	PELUANG		ANCAMAN	
	1		1	
	2		2	
	3		3	
	4		4	
	5		5	
	6		6	
	7		7	
	8		8	

Tabel 1. Contoh Tabel Analisis SWOT

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Kegiatan 1 (Diskusi Kelompok)

Peserta dibagi menjadi 5 (lima) kelompok. Masing-masing kelompok diberikan tugas sebagai berikut:

- Kelompok 1 : Mendiskusikan dan menganalisis kelemahan kesadaran berbangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia menggunakan metode *Problem Tree Analysis* (Analisis Pohon Masalah).
- Kelompok 2 : Mendiskusikan dan menganalisis kelemahan kesadaran berbangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia menggunakan metode *The Method of Root Cause Analysis and Solutions (MRCAS)* atau Metode Analisis Akar Masalah dan Solusi (MAAMS).
- Kelompok 3 : Mendiskusikan dan menganalisis kelemahan kesadaran berbangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia menggunakan metode *Fishbone diagram*.
- Kelompok 4 : Mendiskusikan dan menganalisis kelemahan kesadaran berbangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia menggunakan metode Metode Pemecahan Masalah (*Problem Solving Method*).
- Kelompok 5 : Mendiskusikan dan menganalisis kelemahan kesadaran

berbangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia menggunakan metode Analisis SWOT

Hasil analisis dituliskan di kertas plano. Selanjutnya akan dipresentasikan dengan metode *Window Shopping* pada kegiatan 2.

2. Kegiatan 2 (Window Shopping)

- (1) Dari hasil kerja pada kegiatan 1, masing-masing kelompok menentukan juru bicara atau presenter yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang bersangkutan, serta bertugas menjawab/mengklarifikasi/menjelaskan jika ada pertanyaan dari anggota lain yang berkunjung untuk melihat hasil kerja kelompok yang bersangkutan.
- (2) Anggota-anggota kelompok yang lain akan berkeliling untuk melihat hasil kerja kelompok lain dan berkewajiban untuk memberikan saran/komentar/masukan/apresiasi terhadap hasil kerja kelompok yang dikunjungi. Saran/komentar/masukan/apresiasi dituliskan di papan panel hasil kerja yang dikunjungi.
- (3) Setelah selesai, masing-masing kelompok secara bergantian memaparkan kesimpulan dari hasil kunjungan ke kelompok lain.
- (4) Merangkum kesepakatan-kesepakatan antarkelompok.

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Buatlah artikel populer dengan tema permasalahan implementasi kesadaran berbangsa dan bernegara di Indonesia.

F. Rangkuman

Perkembangan kesadaran berbangsa dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia mengalami dinamika. Kondisi bangsa saat ini memperlihatkan penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Maraknya konflik vertikal dan horizontal yang terjadi di Indonesia menunjukkan gejala kesadaran berbangsa dan bernegara yang belum baik. Berbagai permasalahan tersebut dapat dianalisis menggunakan beragam metode analisis permasalahan antara lain: *Problem Tree Analysis* (Analisis Pohon Masalah), *The Method of Root Cause Analysis and Solutions* (MRCAS) atau Metode Analisis Akar Masalah dan Solusi (MAAMS),

Fishbone diagram, Metode Pemecahan Masalah (*Problem Solving Method*), dan metode Analisis SWOT.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu ?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pembelajaran ini?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 7 ANALISIS PERMASALAHAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Disusun Diana Wulandari, S.Pd.

A. Tujuan Pembelajaran

Tujuan kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat:

1. Mendiskusikan permasalahan dalam implementasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia sesuai fakta.
2. Mendiskusikan metode analisis permasalahan sesuai konsep.
3. Menganalisis permasalahan dalam implementasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia dengan menggunakan metode-metode analisis permasalahan.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran ini adalah:

1. mendiskusikan permasalahan dalam implementasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia
2. mendiskusikan metode analisis permasalahan
3. menganalisis permasalahan dalam implementasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia

C. Uraian Materi

1. Permasalahan dalam Implementasi Perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia

Kenyataan menunjukkan bahwa masalah HAM di Indonesia selalu menjadi sorotan tajam dan bahan perbincangan terus-menerus, baik karena konsep dasarnya yang bersumber dari UUD 1945 maupun dalam realita praktisnya di lapangan ditengarai penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Sebab-sebab pelanggaran HAM antara lain adanya arogansi kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat yang berkuasa, yang mengakibatkan sulit mengendalikan dirinya sendiri sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak

orang lain. Terutama dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, isu mengenai HAM di Indonesia bergerak dengan cepat dan dalam jumlah yang sangat mencolok. Gerak yang cepat tersebut terutama karena memang telah terjadi begitu banyak pelanggaran HAM, mulai dari yang sederhana sampai pada pelanggaran HAM berat (gross human right violation). Di samping itu juga karena gigihnya organisasi-organisasi masyarakat dalam memperjuangkan pemajuan dan perlindungan HAM.

Berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam rangka penghormatan, pengakuan, penegakan hukum dan HAM antara lain:

1. Penegakan Hukum di Indonesia belum dirasakan optimal oleh masyarakat. Hal itu antara lain, ditunjukkan oleh masih rendahnya kinerja lembaga peradilan. Penegakan hukum sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang sudah selesai tahap penyelidikannya pada tahun 2002, 2003, dan 2004, sampai sekarang belum ditindaklanjuti tahap penyelidikannya.
2. Masih ada peraturan perundang-undangan yang belum berwawasan gender dan belum memberikan perlindungan HAM. Hal itu terjadi antara lain, karena adanya aparat hukum, baik aparat pelaksana peraturan perundang-undangan, maupun aparat penyusun peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai pemahaman yang cukup atas prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.
3. Belum membaiknya kondisi kehidupan ekonomi bangsa sebagai dampak krisis ekonomi yang terjadi telah menyebabkan sebagian besar rakyat tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya baik itu hak ekonominya seperti belum terpenuhinya hak atas pekerjaan yang layak dan juga hak atas pendidikan.
4. Sepanjang tahun 2004 telah terjadi beberapa konflik dalam masyarakat, seperti Aceh, Ambon, dan Papua yang tidak hanya melibatkan aparat negara tetapi juga dengan kelompok bersenjata yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak untuk hidup secara aman dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan.
5. Adanya aksi terorisme yang ditujukan kepada sarana publik yang menyebabkan rasa tidak aman bagi masyarakat.
6. Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antara satu negara dengan negara lainnya menjadi makin tinggi. Dengan demikian kecenderungan munculnya kejahatan yang bersifat transnasional menjadi

makin sering terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain, terkait dengan masalah narkoba, pencucian uang dan terorisme. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah adanya peredaran dokumen palsu. Yang membuat orang-orang luar bebas datang ke Indonesia.

Adapun faktor penyebab dari berbagai permasalahan-permasalahan HAM tersebut, antara lain:

1. Faktor Kondisi Sosial-Budaya

- Stratifikasi dan status sosial; yaitu tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, keturunan dan ekonomi masyarakat Indonesia yang multikompleks (heterogen).
- Norma adat atau budaya lokal kadang bertentangan dengan HAM, terutama jika sudah bersinggung dengan kedudukan seseorang, upacara-upacara sakral, pergaulan dan sebagainya.
- Masih adanya konflik horizontal di kalangan masyarakat yang hanya disebabkan oleh hal-hal sepele.

2. Faktor Komunikasi dan Informasi

- Letak geografis Indonesia yang luas dengan laut, sungai, hutan, dan gunung yang membatasi komunikasi antar daerah.
- Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun secara baik yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.
- Sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi yang masih sangat terbatas baik sumber daya manusianya maupun perangkat (software dan hardware) yang diperlukan.

3. Faktor Perangkat Perundangan

- Pemerintah tidak segera meratifikasikan hasil-hasil konvensi internasional tentang hak asasi manusia.
- Walaupun ada, peraturan perundang-undangan masih sulit untuk diimplementasikan.

4. Faktor Kebijakan Pemerintah

- Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang sama tentang pentingnya jaminan hak asasi manusia.
- Ada kalanya demi kepentingan stabilitas nasional, persoalan hak asasi manusia sering diabaikan.

- Peran pengawasan legislatif dan kontrol sosial oleh masyarakat terhadap pemerintah sering diartikan oleh penguasa sebagai tindakan pembangkangan.

5. Faktor Aparat dan Penindakannya (*Law Enforcement*)

- Masih adanya oknum aparat yang secara institusi atau pribadi mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan hak asasi manusia.
- Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layak sering membuka peluang jalan-pintas untuk memperkaya diri.
- Pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat masih diskriminatif, tidak konsekuen, dan tindakan penyimpangan berupa KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

6. Faktor kondisi supremasi hukum

- Masih marak mentalitas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), budaya kekerasan, ketidakjujuran, serta perekayasa di kalangan aparat penegak hukum. Bahkan, hal itu juga terjadi di kalangan pemerintah, birokrasi, militer, atau bahkan di kalangan anggota DPR dan MPR yang terhormat.
- Belum terbentuknya budaya hukum yang menghormati HAM, baik oleh para pejabat maupun kalangan praktisi hukum, serta masyarakat pada umumnya. Dalam pelaksanaan hukum, semakin terlihat banyak "sandiwara" pengadilan atau banyak praktik ke-pura-puraan pengadilan. Hal ini jelas menjadikan reformasi bidang hukum semakin carut-marut.

Dari gambaran sekilas di atas mencerminkan bahwa dalam pengimplementasian HAM sangat tergantung pada kondisi masing-masing negara. Negara Indonesia dengan ideologi Pancasila tentu berbeda dengan negara-negara Barat, seperti Amerika dengan paham liberalismenya memungkinkan masyarakatnya untuk melakukan segala sesuatu dengan sebebaskan-bebasnya. Sedangkan peran pemerintah sangat kecil dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini tentu sangat berbeda dengan ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila mengajarkan hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan hak asasi orang lain. Sehingga walaupun terdapat kebebasan, namun kebebasan tersebut harus bertanggung jawab dalam mengimplementasikan dengan memperhatikan dan tidak mengganggu hak asasi orang lain. Dengan kata lain kebebasan kita dibatasi oleh hak orang lain.

Sejak era reformasi berbagai produk hukum dibuat untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak sipil dan politik, baik melalui meratifikasi konvensi HAM, amandemen konstitusi, pembuatan instrumen HAM, membentuk lembaga yang menaungi dan mengurus HAM serta rencana aksi nasional dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Seperti halnya dari sisi politik, rakyat Indonesia telah menikmati kebebasan politik yang luas. Empat kebebasan dasar, yaitu hak atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berorganisasi, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Melalui berbagai media hampir semua lapisan rakyat Indonesia sudah dapat mengekspresikan perasaan dan pendapatnya tanpa rasa takut seperti pada zaman Orde Baru. Disisi lain kebebasan politik yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang semestinya bagi hak-hak sipil. Seperti, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan dari penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak atas pemeriksaan yang adil dan proses hukum yang semestinya, hak atas pengakuan pribadi di depan hukum, dan larangan atas propaganda untuk perang dan hasutan kebencian. Dari berbagai daerah, seperti, Poso, Lombok, Papua, juga Jakarta, dan tempat-tempat lain di Indonesia, dilaporkan masih terjadi kekerasan horisontal yang melibatkan unsur-unsur polisi dan militer. Penganiayaan dilaporkan masih terus dialami oleh kelompok-kelompok masyarakat, seperti, buruh, petani, masyarakat adat, kelompok minoritas agama, dan para mahasiswa.

2. Metode-Metode Analisis Permasalahan

Berbagai metode analisis permasalahan dapat dipelajari dalam kegiatan pembelajaran 10 yang meliputi: (a) *Problem Tree Analysis* (Analisis Pohon Masalah), (b) *The Method of Root Cause Analysis and Solutions (MRCAS)* atau metode analisis akar masalah dan solusi (MAAMS), (c) *Fishbone diagram* (diagram tulang ikan), (d) analisis SWOT. Metode tersebut dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan dalam implementasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Kegiatan 1 (Diskusi Kelompok)

Peserta diklat dibagi menjadi 5 (lima) kelompok. Masing-masing kelompok diberikan tugas sebagai berikut:

- Kelompok 1 : Mendiskusikan dan menganalisis permasalahan dalam implementasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia menggunakan metode *Problem Tree Analysis* (Analisis Pohon Masalah).
- Kelompok 2 : Mendiskusikan dan menganalisis permasalahan dalam implementasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia menggunakan metode *The Method of Root Cause Analysis and Solutions (MRCAS)* atau Metode Analisis Akar Masalah dan Solusi (MAAMS).
- Kelompok 3 : Mendiskusikan dan menganalisis permasalahan dalam implementasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia menggunakan metode *Fishbone diagram*.
- Kelompok 4 : Mendiskusikan dan menganalisis permasalahan dalam implementasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia menggunakan metode Metode Pemecahan Masalah (*Problem Solving Method*).
- Kelompok 5 : Mendiskusikan dan menganalisis permasalahan dalam implementasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia menggunakan metode Analisis SWOT.

Hasil analisis dituliskan di kertas plano. Selanjutnya akan dipresentasikan dengan metode *Window Shopping* pada kegiatan 2.

2. Kegiatan 2 (Window Shopping)

- (1) Dari hasil kerja pada kegiatan 1, masing-masing kelompok menentukan juru bicara atau presenter yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang bersangkutan, serta bertugas menjawab/mengklarifikasi/menjelaskan jika ada pertanyaan dari anggota lain yang berkunjung untuk melihat hasil kerja kelompok yang bersangkutan.
- (2) Anggota-anggota kelompok yang lain akan berkeliling untuk melihat hasil kerja kelompok lain dan berkewajiban untuk memberikan saran/

komentar/masukan/apresiasi terhadap hasil kerja kelompok yang dikunjungi. Saran/komentar/masukan/apresiasi dituliskan di papan panel hasil kerja yang dikunjungi.

- (3) Setelah selesai, masing-masing kelompok secara bergantian memaparkan kesimpulan dari hasil kunjungan ke kelompok lain.
- (4) Merangkum kesepakatan-kesepakatan antarkelompok.

E. Latihan/Kasus/Tugas

Carilah salah satu kasus permasalahan implementasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Selanjutnya gunakan salah satu metode analisis permasalahan untuk menganalisis permasalahan tersebut!

F. Rangkuman

Kenyataan menunjukkan bahwa masalah HAM di Indonesia selalu menjadi sorotan tajam dan bahan perbincangan terus-menerus, baik karena konsep dasarnya yang bersumber dari UUD 1945 maupun dalam realita praktisnya di lapangan ditengarai penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Adapun faktor penyebab dari berbagai permasalahan-permasalahan HAM tersebut, antara lain: kondisi sosial-budaya, komunikasi dan informasi, perangkat perundangan, kebijakan pemerintah, aparat dan penindakannya (*law enforcement*), serta kondisi supremasi hukum di Indonesia.

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikaji dengan menggunakan metode-metode analisis permasalahan antara lain: *Problem Tree Analysis* (Analisis Pohon Masalah), *The Method of Root Cause Analysis and Solutions (MRCAS)* atau Metode Analisis Akar Masalah dan Solusi (MAAMS), *Fishbone diagram*, Metode Pemecahan Masalah (*Problem Solving Method*), dan Metode Analisis SWOT.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini?

2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini?
3. Apa manfaat kegiatan pembelajaran ini terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pembelajaran ini?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 8 PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI SISTEM DAN BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Disusun Drs. Suwarno, M.H.

A. Tujuan

Tujuan kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat:

1. Menganalisis pengembangan implementasi sistem dan budaya politik di Indonesia dengan baik.
2. Menganalisis faktor-faktor pendukung pengembangan implementasi sistem dan budaya politik di Indonesia dengan baik.
3. Menganalisis model-model pengembangan implementasi sistem dan budaya politik di Indonesia dengan baik.
4. Menganalisis kendala-kendala pengembangan implementasi sistem dan budaya politik di Indonesia dalam berpolitik yang demokratis sesuai fakta.
5. Menganalisis contoh sikap dan perilaku pengembangan implementasi sistem dan budaya politik di Indonesia dengan baik.
6. Menganalisis cara-cara mengatasi kendala-kendala pengembangan implementasi sistem dan budaya politik di Indonesia dalam berpolitik yang demokratis dengan baik.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menganalisis pengembangan implementasi sistem dan budaya politik di Indonesia.
2. Menganalisis faktor-faktor pendukung pengembangan implementasi sistem dan budaya politik di Indonesia.
3. Menganalisis model-model pengembangan implementasi sistem dan budaya politik di Indonesia.
4. Menganalisis kendala-kendala pengembangan implementasi sistem dan budaya politik di Indonesia dalam berpolitik yang demokratis.
5. Menganalisis contoh sikap dan perilaku pengembangan implementasi sistem dan budaya politik di Indonesia.

6. Menganalisis cara-cara mengatasi kendala-kendala pengembangan implementasi sistem dan budaya politik di Indonesia dalam berpolitik yang demokratis.

C. Uraian Materi

1. Menganalisis Pengembangan Implementasi Sistem dan Budaya Politik di Indonesia

Implementasi sistem dan budaya politik di Indonesia harus selalu berkembang, jika sekarang masyarakat hanya berpolitik dengan tipe kaula maka diharapkan dengan adanya pengembangan implementasi sistem dan budaya politik maka Indonesia bisa berdemokrasi partisipan dan sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Pancasila. Implementasi sistem dan budaya politik harus terus dijalankan dengan cara yang tepat, kegiatan sosialisasi politik harus dilakukan dengan maksimal supaya implementasi sistem dan budaya politik dapat berkembang dengan pesat. Karena kurangnya sosialisasi akan jadi hambatan yang besar untuk bisa mengembangkan sistem dan budaya politik di Indonesia. Masyarakat yang tidak faham akan politik tidak akan dengan mudah menerima kegiatan-kegiatan politik.

2. Menganalisis Faktor-Faktor Pendukung Pengembangan Implementasi Sistem Dan Budaya Politik Di Indonesia

Faktor pengembangan implementasi sistem dan budaya politik yang pertama adalah terkait dengan sosialisasi politik, seperti telah dibahas sebelumnya bahwa sosialisasi politik yang baik bisa mendukung pengembangan implementasi sistem dan budaya politik. Jadi sosialisasi politik harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran. Artinya harus dimulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga dan terus berkesinambungan dengan lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Jika salah satu saja rantai ini lepas maka proses sosialisasi tidak berjalan dengan baik. Faktor yang kedua adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, dengan masyarakat yang berpendidikan akan lebih mudah untuk melakukan sosialisasi karena salah satu hambatan dari sosialisasi sendiri adalah

masyarakat yang berpendidikan rendah. Bagaimanapun kerasnya usaha sosialisasi jika masyarakat tidak mengerti atau bahkan tidak peduli terhadap sistem politik maka hasilnya akan sia-sia.

3. Memahami Model-model Pengembangan Implementasi Sistem dan Budaya Politik di Indonesia.

Model budaya yang ingin dikembangkan lewat implementasi sistem dan budaya politik adalah politik tipe partisipan, artinya masyarakat sangat diharapkan berperan aktif dalam kegiatan pemilu sebagai ajang pesta demokrasi bagi rakyat. Masyarakat diharapkan terus berpartisipasi, setelah kegiatan pemilu bukan berarti partisipasi rakyat telah selesai tetapi masih terus berlanjut yakni mengawasi kinerja para elit politik yang telah terpilih dalam pemilu. Jika ada keputusan melenceng yang diambil oleh para pemegang kekuasaan maka rakyat berhak untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait masalah pemerintahan ataupun masalah rakyat yang lain yang bisa diatasi oleh pemerintah sebagai lembaga yang menanungi mereka.

Hanya saja memang tidak mudah untuk melakukan segalanya apalagi mengingat warga negara Indonesia memiliki budaya, kepercayaan, adat istiadat yang sangat beragam. Hal ini juga menjadi hambatan terciptanya budaya politik yang partisipan, belum lagi masyarakat Indonesia yang hidupnya berada di pelosok hutan, jika sudah seperti ini kebanyakan mereka lebih percaya atau menyerahkan segala urusan politik mereka kepada kepala suku atau ketua adat mereka.

4. Menganalisis Kendala-kendala Pengembangan Implementasi Sistem dan Budaya Politik di Indonesia dalam Berpolitik yang Demokratis

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan implementasi sistem dan budaya politik untuk mewujudkan politik yang demokratis adalah kemiskinan, budaya, dan pendidikan. Masalah kemiskinan bisa menghambat terwujudnya politik yang demokratis, karena hal ini bisa saja dimanfaatkan oleh oknum politik untuk memberikan suap atau money politik ketika pemilu akan berlangsung. Sehingga masyarakat miskin tidak akan peduli dengan siapa yang akan memegang tampuk kekuasaan yang terpenting mereka akan memilih siapa yang mau memberikan uang yang lebih banyak.

Permasalahan Budaya, mayoritas penduduk Indonesia adalah suku Jawa, dan budaya yang dominan adalah budaya Jawa. Budaya yang ramai diamalkan orang-orang miskin dalam berdemokrasi adalah budaya warung yang bercorak transaksional. Artinya, siapa yang membeli barang dan membayar, dialah yang akan diberi barang. Dalam pengamalan demokrasi, siapa yang memberi uang dan sembako kepada mereka, dia yang dipilih.

Budaya semacam ini dalam praktik berdemokrasi, telah menciptakan simbiosis mutualistik antara seorang calon dengan pemilih. Kedua belah pihak mendapatkan manfaat, yaitu calon legislatif di semua tingkatan, begitu pula calon pemimpin eksekutif di pusat dan di daerah (kabupaten, kota dan provinsi) yang memerlukan dukungan suara, dan para pemilih yang memerlukan uang, bertemu dalam satu kepentingan. Budaya semacam ini, sering juga disebut budaya patron-client, yaitu kedua belah pihak saling melayani dan saling ketergantungan. Itu sebabnya dalam pengamalan demokrasi di Indonesia, sangat ramai diamalkan politik uang (*money politic*) yang tidak lain merupakan pengamalan dari budaya warung yang bercirikan transaksional. Pertanyaan, apakah UU Pemilu sudah mengatur hal tersebut supaya politik uang tidak semakin merajalela?

Persoalan lain yang berkaitan dengan budaya dan faham agama dalam pengamalan demokrasi, ialah mayoritas pemilih adalah orang Jawa yang sudah tersebar di seluruh pelosok tanah air. Masalah ini sangat penting terutama dalam pemilu Presiden/Wakil Presiden. Kalau budaya yang dominan adalah budaya Jawa, maka pertanyaannya apakah calon Presiden dari luar Jawa memiliki peluang untuk terpilih dalam pemilu Presiden/Wakil Presiden?

Jika merujuk hasil dua pemilu Presiden/Wakil Presiden di era Orde Reformasi, dimana Presiden/Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat Indonesia dalam suatu pemilihan umum, dan berdasarkan hasil penelitian saya di Solo Jawa Tengah, tahun 2004 dan 2006, saya dapat katakan bahwa peluang calon Presiden/Wakil Presiden dari luar Jawa tidak besar. Belum lagi kalau dikaitkan dengan stratifikasi sosial keagamaan di Indonesia, yang masih mendikhotomikan antara abangan dan santri, dapat disimpulkan bahwa golongan abangan lebih besar jumlahnya dibanding santri, yang pada umumnya di Jawa. Masalah tersebut pasti tidak

dirumuskan dalam UU Pemilu. Kita kemukakan hal itu untuk mengingatkan bahwa bangsa ini menghadapi persoalan besar setelah amandemen UUD 1945 dalam pengamalan demokrasi.

5. Menganalisis Cara-Cara Mengatasi Kendala-Kendala Pengembangan Implementasi Sistem Dan Budaya Politik Di Indonesia Dalam Berpolitik Yang Demokratis

Cara-cara untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pengembangan implementasi sistem dan budaya di Indonesia bisa ditempuh dengan beberapa jalan mengatasi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan kesadaran berbhinneka tunggal ika. Jika kemiskinan teratasi maka masyarakat tidak akan dengan mudah menerima uang sogokan yang diberikan ketika akan diadakan pemilu/*money politik*. Meningkatkan pendidikan dari segi kualitas maupun kuantitas. Pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi pola pikir masyarakat kearah yang lebih positif. Meningkatkan kesadaran ber-Bhinneka Tunggal Ika, meskipun memiliki banyak perbedaan dalam segala hal akan tetapi harus selalu diingat bahwa kita berada di naungan yang sama yakni negara Indonesia.

D. Aktivitas Pembelajaran

Model pembelajaran *problem based learning* ini bertujuan merangsang peserta untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya melalui langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:

1. Mengorientasi peserta pada masalah. Tahap ini untuk memfokuskan peserta diklat mengamati masalah yang menjadi objek pembelajaran.
2. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Peserta menyampaikan berbagai pertanyaan (atau menanya) terhadap masalah kajian.
3. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada tahap ini peserta melakukan percobaan (mencoba) untuk memperoleh data dalam rangka menjawab atau menyelesaikan masalah yang dikaji.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta mengasosiasi data yang ditemukan dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber.

5. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Setelah peserta mendapat jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan dievaluasi.

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Susunlah berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan budaya politik yang baik dalam masyarakat Indonesia!

F. Rangkuman

1. Implementasi sistem dan budaya politik di Indonesia harus selalu berkembang, jika sekarang masyarakat hanya berpolitik dengan tipe kaula maka diharapkan dengan adanya pengembangan implementasi sistem dan budaya politik maka Indonesia bisa berdemokrasi partisipan dan sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Pancasila.
2. Faktor pengembangan implementasi sistem dan budaya politik di Indonesia adalah faktor pendidikan dan faktor sosialisasi politik.
3. Model budaya politik yang ingin dicapai bangsa ini adalah budaya politik partisipan yang tetap mengacu pada Pancasila.
4. Faktor yang dihadapi dalam masalah pengembangan sistem dan budaya politik yang demokratis adalah masalah kemiskinan, budaya, dan pendidikan.
5. Cara untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul adalah dengan mengentaskan kemiskinan, meningkatkan taraf pendidikan, dan menyatukan budaya yang beragam di Indonesia.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah kegiatan pembelajaran ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah kegiatan pembelajaran ini?
3. Apa manfaat kegiatan pembelajaran ini terhadap tugas Bapak/Ibu ?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pembelajaran ini?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 9 PENGEMBANGAN HUBUNGAN INTERNASIONAL NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Disusun Drs. Ilzam Marzuk, M.A.Educ.

A. Tujuan

Tujuan kegiatan pembelajaran ini agar peserta dapat menyimpulkan hasil analisis permasalahan implementasi hubungan internasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai teori dan kenyataan.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Menyimpulkan hasil analisis permasalahan implementasi hubungan internasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Uraian Materi

1. Hubungan Indonesia dengan Malaysia.

Diberitakan bahwa negara Indonesia dan Malaysia menandatangani MoU kerja sama di bidang pertanian membahas ketahanan pangan. Tujuan kerja sama itu untuk memperkuat, mempromosikan, dan mengembangkan kerja sama bilateral antara dua negara berbasiskan saling menguntungkan di bidang makanan, hortikultura, peternakan, agrobisnis, dan bidang lainnya yang disetujui kedua belah pihak. Indonesia dan Malaysia memandang perlunya peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi dan energi, termasuk kerjasama sub regional melibatkan kerjasama dalam kerangka segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMS dan IMT-GT). Di bidang sosial dan kesejahteraan, kedua pemimpin negara juga bersepakat terus menggalang kerjasama khususnya di bidang ketenagakerjaan.

2. Hubungan Indonesia dengan Singapura

Indonesia dan Singapura sepakat membentuk enam kelompok kerja guna meningkatkan kerja sama ekonomi di antara kedua negara. Keenam kelompok kerja itu mencakup peningkatan kerjasama di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, untuk peningkatan investasi, peningkatan kerja sama bidang transportasi udara, peningkatan kerjasama pariwisata, kerjasama di bidang tenaga kerja serta kerjasama di bidang bisnis pertanian.

3. Hubungan Indonesia dengan Thailand

Pemerintah Indonesia dan Thailand sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pertanian, terutama alih teknologi informasi dan teknologi, perdagangan, pelatihan, teknik dan penelitian dalam bidang pertanian. Bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan menurut isi nota kesepahaman itu antara lain menyangkut promosi perdagangan komoditi pertanian; pengelolaan dan perlindungan keragaman hayati pertanian; pengembangan dan penyuluhan pertanian; kerja sama teknik dan peningkatan SDM; serta pengelolaan dan perlindungan lahan-lahan pertanian dan air.

4. Hubungan Indonesia dengan Filipina

Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Filipina mencapai kesepakatan kerjasama empat agenda yang menonjol, yakni masalah keamanan, politik, ekonomi, serta pendidikan dan latihan. Dalam masalah keamanan kedua Negara sepakat meningkatkan kerjasama dalam menghadapi kejahatan transnasional, ancaman keamanan non tradisional termasuk terorisme, penyelundupan barang dan jasa, penyelundupan manusia, perdagangan gelap, narkoba, penyanderaan, gerakan terorisme regional.

5. Hubungan Indonesia dengan Brunei Darussalam

Indonesia dan Brunei Darussalam mengadakan kerjasama di bidang industri pertahanan. Terkait perjanjian kerja sama pertahanan kedua Negara atau *Defence Cooperation Agreement (DCA)*, antara Indonesia-

Brunei Darussalam saat ini masih dalam proses ratifikasi di parlemen. DCA antara kedua negara sangat penting dalam rangka memperkuat hubungan kerja sama pertahanan, baik kerja sama di bidang latihan kedua angkatan bersenjata, tukar menukar perwira, kerjasama industri pertahanan, pendidikan maupun kerjasama di bidang lain.

6. Hubungan Perekonomian Indonesia - Jepang

Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor Indonesia. Berdasarkan saran dan dialog yang sejak dulu diadakan antara Japan Club dan pemerintah Indonesia, telah berhasil disetujui SIAP, yaitu rencana strategis investasi yang meliputi 5 pokok, yaitu masalah bea, *customs*, tenaga kerja, infrastruktur dan daya saing.

7. Hubungan Indonesia dengan India

Indonesia sepakat untuk bekerja sama dengan India di sektor industri tekstil.

8. Hubungan Indonesia dengan China

Hubungan Indonesia dengan China terwujud dalam kerjasama bidang energi dan pertambangan itu adalah penunjukan Shanghai Know-How Marine Equipment sebagai distributor pelumas Marine Pertamina, pengelolaan proyek Madura Strait PSC (proyek blok gas yang terletak di selat Madura), dalam bidang pertanian (seperti pengembangan benih hibrida, bioteknologi sayuran, dan riset hortikultural), infrastruktur (misalnya pembangunan jembatan dan serat optic), bidang perikanan dan kebudayaan, dan sebagainya.

D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mentor/fasilitator menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; 2. Mentor/fasilitator mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat.

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
	3. Mentor/fasilitator menyampaikan garis besar cakupan materi
Kegiatan Inti	<p>Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mentor/fasilitator memberi informasi dan tanya jawab dengan contoh kontekstual tentang Pengembangan Implementasi Hubungan Internasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kelas dibagi menjadi 5 kelompok 3. Mentor/fasilitator memberi tugas 4. Peserta berdiskusi mengerjakan latihan/tugas/kasus 5. Masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. 6. Mentor/fasilitator memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok.
Kegiatan Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mentor/fasilitator bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 2. Peserta melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3. Mentor/fasilitator memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4. Peserta merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Tugas kelompok A

Menganalisis hubungan Indonesia dengan Malaysia terkait konflik Sipadan dan Ligitan. Deskripsikan kasus tersebut dan bagaimana upaya untuk menyelesaikan kasus itu?

2. Tugas kelompok B

Menganalisis hubungan Indonesia dengan Singapura terkait kabut asap yang disebabkan pembakaran hutan di Indonesia. Deskripsikan kasus tersebut dan bagaimana upaya untuk menyelesaikan kasus itu?

3. Tugas kelompok C

Menganalisis hubungan Indonesia dengan Myanmar terkait kasus pengungsi Rohingya. Deskripsikan kasus tersebut dan bagaimana upaya untuk menyelesaikan kasus itu?

4. Tugas kelompok D

Menganalisis hubungan Indonesia dengan Filipina terkait kasus penculikan dan penyanderaan warga negara Indonesia di Filipina. Deskripsikan kasus tersebut dan bagaimana upaya untuk menyelesaikan kasus itu?

5. Tugas kelompok E

Menganalisis hubungan Indonesia dengan RRC terkait batas perairan di wilayah Natuna, Laut China Selatan. Deskripsikan kasus tersebut dan bagaimana upaya untuk menyelesaikan kasus itu?

F. Rangkuman

Hubungan internasional di masa-masa mendatang akan semakin kompleks. Permasalahan-permasalahan internasional baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi domestik suatu negara. Oleh karenanya perlu adanya peningkatan dan pengembangan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini?
3. Apa manfaat kegiatan pembelajaran ini terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pembelajaran ini?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 10 PENILAIAN AUTENTIK SEBAGAI PENILAIAN PEMBELAJARAN PPKn SMA/SMK

Disusun Drs. Ilzam Marzuk, M.A.Educ.

A. Tujuan

Tujuan kegiatan pembelajaran ini agar peserta dapat:

1. Mendalami konsep penilaian autentik melalui mengkaji referensi.
2. Menyusun instrumen penilaian sikap melalui diskusi dan kerja kelompok.
3. Menyusun instrumen penilaian pengetahuan melalui diskusi dan kerja kelompok.
4. Menyusun instrumen penilaian keterampilan melalui diskusi dan kerja kelompok.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Mendalami konsep penilaian autentik.
2. Menyusun instrumen penilaian sikap.
3. Menyusun instrumen penilaian pengetahuan.
4. Menyusun instrumen penilaian keterampilan.

C. Uraian Materi

1. Penilaian Autentik

Penilaian autentik merupakan pendekatan dan instrumen penilaian yang memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sudah dimilikinya dalam bentuk tugas-tugas: membaca dan meringkasnya, eksperimen, mengamati, survei, proyek, makalah, membuat multi media, membuat karangan, dan diskusi kelas. Hasil penilaian autentik dapat digunakan oleh pendidik untuk merencanakan program perbaikan (*remedial*), pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian autentik dapat digunakan sebagai

bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang memenuhi Standar Penilaian Pendidikan.

2. Penilaian Kompetensi Sikap

a. Penilaian kompetensi sikap melalui observasi

Mata Pelajaran : PPKn
 Kelas/Semester :
 Topik/Subtopik :
 Indikator : Peserta didik menunjukkan perilaku ilmiah disiplin, tanggung jawab, jujur, teliti dalam merancang dan melakukan praktek dalam pembelajaran PPKn

Berikan skor pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan .

1. jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan
2. jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan
3. jika sering berperilaku dalam kegiatan
4. jika selalu berperilaku dalam kegiatan

No	Nama Siswa	Disiplin	Tanggung jawab	Jujur	Teliti	Kreatif	ilmiah	Jumlah Skor
1.								
dst								

Lembar Penilaian Sikap/Perilaku pada saat Diskusi

Lembar Penilaian Kegiatan Diskusi

Mata Pelajaran : PPKn
 Kelas/Semester : X / 1
 Topik/Subtopik :
 Indikator : Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toleran, responsif dan proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan.

Berikan skor pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.

1. jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan
2. jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan
3. jika sering berperilaku dalam kegiatan
4. jika selalu berperilaku dalam kegiatan

No	Nama Siswa	Kerja sama	Santun	Toleran	Responsif	Proaktif	Bijaksana	Jumlah Skor
1.							
dst								

Penilaian sikap untuk setiap peserta didik dapat menggunakan rumus berikut

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlahskor}}{24} \times 100$$

PREDIKAT	NILAI
Sangat Baik (SB)	$80 \leq AB \leq 100$
Baik (B)	$70 \leq B \leq 79$
Cukup (C)	$60 \leq C \leq 69$
Kurang (K)	<60

b. Penilaian Sikap melalui Penilaian Diri

Penilaian diri dapat dilakukan pada setiap selesai mempelajari satu KD.

Format Penilaian Diri untuk Tugas Proyek PPKN adalah sebagai berikut.

Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda V pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya.

No	Pernyataan	YA	TIDAK
1	Selama melakukan tugas kelompok saya bekerjasama dengan teman satu kelompok		
dst		

Dari penilaian diri ini Anda dapat memberi skor misalnya YA=2, Tidak =1 dan membuat rekapitulasi bagi semua peserta didik.

c. Penilaian Sikap antar Peserta Didik

Mata Pelajaran : PPKn

Kelas/Semester : X / 1

Topik/Subtopik :

Indikator : Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toleran, responsif dan proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan.

- Amati perilaku temanmu dengan cermat selama mengikuti pembelajaran PPKn.
- Berikan tanda v pada kolom yang disediakan berdasarkan hasil pengamatanmu.
- Serahkan hasil pengamatanmu kepada gurumu

No	Perilaku	Dilakukan/muncul	
		YA	TIDAK
1	Mau menerima pendapat teman		
dst		

Keterangan:

1. Perilaku/sikap pada instrumen di atas ada yang positif (no 1.3 dan 4) dan ada yang negatif (no 2) Pemberian skor untuk perilaku positif = 2, Tidak = 1. Untuk yang negatif Ya = 1 dan Tidak = 2
2. Selanjutnya guru dapat membuat rekapitulasi hasil penilaian menggunakan format berikut:

No	Nama	Skor perilaku/sikap					Jumlah	Nilai
		1	2	3	4	5		
1	Deni	2	2	1	2	2	9	
2								
3								
dst								

Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:

$$Nilai = \frac{\text{Jumlah skor}}{2 \times \text{jumlah perilaku}} \times 100$$

d. Penilaian diri setelah melaksanakan suatu tugas.

Penilaian Diri			
Tugas :	Nama :		
	Kelas :		
<i>Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda V pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya.</i>			
No	Pernyataan	YA	TIDAK
1	Selama melakukan tugas kelompok saya bekerjasama dengan teman satu kelompok		
dst		

Dari penilaian diri ini Anda dapat memberi skor misalnya YA=2, Tidak =1 dan membuat rekapitulasi bagi semua peserta didik.

REKAPITULASI PENILAIAN DIRI PESERTA DIDIK

Mata Pelajaran:.....

Topik/Materi:.....

Kelas:.....

No	Nama	Skor Pernyataan Penilaian Diri					Jumlah	Nilai
		1	2	3		
1	Eka	2	1	2		
dst								

Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:

$$Nilai = \frac{\text{Jumlah skor}}{2 \times \text{jumlah pernyataan}} \times 100$$

e. Penilaian Sikap Melalui Jurnal

Petunjuk pengisian jurnal sama dengan model ke satu (diisi oleh guru)

<u>JURNAL</u>			
Nama Peserta Didik :			
Kelas :			
Aspek yang diamati :			
NO	HARI/TANGGAL	KEJADIAN	KETERANGAN/ TINDAK LANJUT
1.			
...			

3. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dapat berupa tes tulis, lisan dan penugasan. Teknik dan bentuk instrumen penilaian kompetensi pengetahuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Teknik Penilaian	Bentuk Instrumen
Tes tulis	Pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian.
Tes lisan	Daftar pertanyaan.
Penugasan	Pekerjaan rumah dan/atau tugas yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

4. Penilaian Kompetensi Keterampilan

a. Penilaian Proyek

Berikut contoh format penilaian proyek kerja bakti.

Kelompok :
 Anggota :
 Tema Proyek :

No	Aspek Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
A	Persiapan				
1	Kesesuaian tema dengan KD				
2	Pembagian tugas				
3	Persiapan alat				
B	Pelaksanaan				
1	Kesesuaian dengan rencana				
2	Ketepatan waktu				
3	Hasil kerja/Manfaat				
C	Laporan Kegiatan				
1	Isi laporan				
2	Penggunaan bahasa				
3	Estetika (kreatifitas, penjilidan,dll)				
D	Penyajian Laporan				
1	Menanya				
2	Argumentasi				
3	Bahan tayang				
Jumlah Skor					

b. Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Contoh laporan pengamatan dan pengukuran atau laporan proyek.

1. Penilaian Pengetahuan

Penilaian rapor untuk pengetahuan menggunakan penilaian kuantitatif dengan skala 1 – 4 (kelipatan 0,33), dengan 2 (dua) desimal dan diberi predikat sebagai berikut:

A : 3,67 – 4,00	C+ : 2,01 - 2,33
A- : 3,34 - 3,66	C : 1,67 - 2,00
B+ : 3,01 - 3,33	C- : 1,34 - 1,66
B : 2,67 - 3,00	D+ : 1,01 - 1,33
B- : 2,34 - 2,66	D : ≤ 1,00

Penghitungan Nilai Pengetahuan adalah dengan cara:

Menggunakan skala nilai 0 sd 100

Contoh: Perhitungan nilai rapor pengetahuan seorang peserta didik pada mata pelajaran PPKn

$$\begin{aligned} \text{NH} &= 80 \\ \text{UTS} &= 75 \\ \text{UAS} &= 85 \\ \text{Nilai Rapor} &= 80+75+85 : 3 = 240 : 3 \\ \text{Nilai Rapor} &= 80 \\ \text{Nilai Konversi} &= (80 :100) \times 4 = 3.20 = \text{B+} \end{aligned}$$

Yang ditulis pada rapor adalah nilai koversi (3.20) dan predikatnya (B+).

2. Penilaian Keterampilan

Pengolahan Nilai Rapor untuk Keterampilan menggunakan penilaian kuantitatif dengan skala 1 - 4 (kelipatan 0,33), dengan 2 (dua) desimal dan diberi predikat sebagai berikut:

A : 3,67 – 4.00	C+ : 2,01 - 2,33
A- : 3,34 - 3,66	C : 1,67 - 2,00
B+ : 3,01 - 3,33	C- : 1,34 - 1,66
B : 2,67 - 3,00	D+ : 1,01 - 1,33
B- : 2,34 - 2,66	D : ≤ 1,00

Contoh: Perhitungan nilai rapor keterampilan seorang peserta didik pada mata pelajaran PPKn

$$\begin{aligned} \text{Nilai Praktik} &= 80 \\ \text{Nilai Projek} &= 75 \\ \text{Nilai Portofolio} &= 80 \\ \text{Nilai Rapor} &= 80+75+80 : 3 = 235 : 3 \\ \text{Nilai Rapor} &= 78.33 \\ \text{Nilai Konversi} &= (78.33/100) \times 4 = 3,13 = \text{B+} \end{aligned}$$

3. Penilaian Sikap

Untuk penilaian Sikap Spiritual dan Sosial (KI-1 dan KI-2) menggunakan nilai Kualitatif sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{SB} &= \text{Sangat Baik} &= & 80 - 100 \\ \text{B} &= \text{Baik} &= & 70 - 79 \\ \text{C} &= \text{Cukup} &= & 60 - 69 \\ \text{K} &= \text{Kurang} &= & < 60 \end{aligned}$$

Contoh: Perhitungan nilai rapor sikap seorang peserta didik pada mata

Nilai Observasi = 85

Nilai diri sendiri = 75

Nilai antar teman = 80

Nilai Jurnal = 75

Nilai Rapor = $85+75+80+75 : 4 = 315 : 4$

Nilai Rapor = 79

Predikat = Baik

Nilai Konversi = $79/100 \times 4 = 3,16$ (B+)

D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mentor/fasilitator menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; 2. Mentor/fasilitator mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. 3. Mentor/fasilitator menyampaikan garis besar cakupan materi penyusunan instrumen penilaian autentik.
Kegiatan Inti	<p>Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mentor/fasilitator memberi informasi dan tanya jawab dengan contoh kontekstual tentang analisis pengembangan penilaian autentik pembelajaran akuntansi dengan menggunakan contoh yang kontekstual. 2) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C, s/d kelompok F) 3) Mentor/fasilitator memberi tugas 4) Peserta diklat berdiskusi 5) Mentor/fasilitator melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi.

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
	6) Masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. 7) Mentor/fasilitator memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok.
Kegiatan Penutup	1. Mentor/fasilitator bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 2. Peserta melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4. Peserta merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas kelompok A

Susunlah model penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk KD PPKn kelas X SMA semester 1

Tugas kelompok B

Susunlah model penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk KD PPKn kelas X SMA semester 2

Tugas kelompok C

Susunlah model penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk KD PPKn kelas XI SMA semester 1

Tugas kelompok D

Susunlah model penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk KD PPKn kelas XI SMA semester 2

Tugas kelompok E

Susunlah model penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk KD PPKn kelas XII SMA semester 1

Tugas kelompok F

Susunlah model penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk KD PPKn kelas XII SMA semester 2

F. Rangkuman

1. Kurikulum 2013 menerapkan penilaian autentik untuk menilai sikap peserta didik meliputi: sikap, pengetahuan, keterampilan. Ada beberapa cara untuk menilai sikap peserta didik antara lain melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya dan penilaian jurnal. Instrument yang digunakan daftar cek, skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik dan hasil akhirnya dihitung berdasarkan modus.
2. Penilaian kompetensi pengetahuan: tes tertulis yang menjadi penilaian autentik adalah soal-soal yang menghendaki peserta didik merumuskan jawabannya sendiri, seperti soal-soal uraian, soal-soal menghendaki peserta didik mengemukakan atau mengekspresikan gagasan, dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-kata sendiri. Observasi terhadap diskusi, tanya jawab dan percakapan teknik ini adalah cerminan dari penilaian autentik. Penilaian kompetensi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak dan keterampilan konkrit.
3. Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan dengan menggunakan unjuk kerja/kinerja/praktik, proyek, produk, portofolio, tertulis selain untuk pengetahuan, penilaian tertulis juga digunakan untuk menilai kompetensi keterampilan seperti menulis karangan, laporan.

B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu lakukan setelah kegiatan pelatihan ini?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 11 PEMECAHAN PERMASALAHAN PENYUSUNAN SILABUS DAN RPP

Disusun Drs. Ilzam Marzuk, M.A.Educ.

A. Tujuan

Tujuan kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu memecahkan permasalahan dalam penyusunan silabus dan RPP PPKn dengan baik.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Memecahkan permasalahan dalam penyusunan silabus materi pada mata pelajaran PPKn sesuai dengan proses penyusunannya.
2. Memecahkan permasalahan dalam penyusunan RPP materi pada mata pelajaran PPKn sesuai dengan proses penyusunannya.

C. Uraian Materi

1. Pengembangan silabus

Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. Langkah-langkah pengembangan silabus:

1. Mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada Standar Isi.
2. Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar.
3. Mengembangkan kegiatan pembelajaran.
4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi.
5. Penentuan jenis penilaian.
6. Menentukan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar.
7. Menentukan sumber belajar.

8. Pengembangan silabus berkelanjutan.

2. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

- a. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik
- b. Mendorong partisipasi aktif peserta didik
- c. Mengembangkan budaya membaca dan menulis.
- d. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut
- e. Keterkaitan dan keterpaduan
- f. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi

3. Komponen RPP

Komponen-komponen dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) terdiri dari: identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran (pendahuluan, inti, penutup), penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

1. Kegiatan Pendahuluan

- a. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya materi yang akan dipelajari, atau bernyanyi, bercerita, memutar video, dan sebagainya.
- c. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai
- d. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

2. Kegiatan Inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik dengan menerapkan langkah-langkah pendekatan saintifik, meliputi kegiatan

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/ eksperimen, mengasosiasi/mengolah materi, dan mengomunikasikan hasil belajar.

3. Kegiatan Penutup

- a. Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran;
- b. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
- c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
- d. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik;
- e. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mentor/fasilitator menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; 2. Mentor/fasilitator mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. 3. Mentor/fasilitator menyampaikan garis besar cakupan materi Menganalisis Permasalahan penyusunan silabus dan RPP.
Kegiatan Inti	<p>Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mentor/fasilitator memberi informasi dan tanya jawab dengan contoh kontekstual tentang Menganalisis Permasalahan penyusunan silabus dan RPP 2. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok. 3. Mentor/fasilitator memberi tugas 4. Peserta diklat berdiskusi

	<p>5. Peserta melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi.</p> <p>6. Masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.</p> <p>7. Peserta memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .</p>
Kegiatan Penutup	<p>1. Mentor/fasilitator bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran</p> <p>2. Peserta melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</p> <p>3. Mentor/fasilitator memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>4. Peserta merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</p>

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas kelompok A

Susunlah RPP untuk KD PPKn kelas X SMA semester 1, serta analisis kesulitan/permasalahan dalam penyusunan RPP tersebut

Tugas kelompok B

Susunlah RPP untuk KD PPKn kelas X SMA semester 2, serta analisis kesulitan/permasalahan dalam penyusunan RPP tersebut

Tugas kelompok C

Susunlah RPP untuk KD PPKn kelas XI SMA semester 1, serta analisis kesulitan/permasalahan dalam penyusunan RPP tersebut

Tugas kelompok D

Susunlah RPP untuk KD PPKn kelas XI SMA semester 2, serta analisis kesulitan/permasalahan dalam penyusunan RPP tersebut

Tugas kelompok E

Susunlah RPP untuk KD PPKn kelas XII SMA semester 1, serta analisis kesulitan/permasalahan dalam penyusunan RPP tersebut

Tugas kelompok F

Susunlah RPP untuk KD PPKn kelas XII SMA semester 2, serta analisis kesulitan/permasalahan dalam penyusunan RPP tersebut

F. Rangkuman

Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. Penyusunan RPP memperhatikan perbedaan individu peserta didik, mendorong partisipasi aktif peserta didik, mengembangkan budaya membaca dan menulis, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, keterkaitan dan keterpaduan, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Komponen-komponen dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) terdiri dari: identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran (pendahuluan, inti, penutup), penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa pengalaman yang Bapak/Ibu dapatkan dalam kegiatan pembelajaran ini?
2. Apa manfaat kegiatan pembelajaran ini terhadap tugas Bapak/Ibu?
3. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu lakukan setelah kegiatan pembelajaran ini?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 12 KAJIAN KRITIS KARYA TULIS ILMIAH (KTI)

Disusun Drs. Ilzam Marzuk, M.A.Educ.

A. Tujuan

Tujuan kegiatan pembelajaran ini peserta dapat:

1. Memahami cara menulis kajian kritis sesuai dengan kaidah.
2. Menyusun kajian kritis sesuai dengan kaidah.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Memahami cara menulis kajian kritis.
2. Menyusun kajian kritis

C. Uraian Materi

1. Contoh Laporan Hasil Kajian Kritis atas Tulisan/Artikel Ilmiah

Berikut contoh karya ilmiah yang merupakan hasil kajian kritis dengan judul “*Character Building* Sebagai Modal Menghadapi Tantangan Global” yang ditulis secara tim (kelompok).

A. PENDAHULUAN

Secara umum kajian kritis terhadap artikel ini bertujuan menelusuri tulisan tertentu untuk keperluan pengembangan gagasan dalam sebuah artikel ilmiah. Secara khusus kajian kritis ini bertujuan untuk pengayaan konsep dan model-model pengembangan gagasan yang telah dilakukan oleh penulis. Pilihan tulisan jatuh kepada tulisan B. Suparlan dari PPPPTK PKn dan IPS judul *Character Building* Sebagai Modal Menghadapi Tantangan Global. Tulisan ini diperoleh dari buletin Mipsos PPPPTK PKn dan IPS terbitan Juni 2010. Alasan pemilihan tulisan ini adalah topik yang disajikan bersifat aktual dan saat ini sedang mendapat perhatian dari kalangan pendidikan,. Tulisan dalam artikel ini dapat memberi kesempatan kepada kita untuk berdiskusi tentang pembangunan karakter, dan mengaitkan materi diskusi dengan isi artikel ini.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan kajian kritis pada artikel ini adalah (1) bagi peserta kegiatan BERMUTU yang belum memiliki topik PTK, hasil kajian kritis ini dapat membentangkan jalan menuju identifikasi masalah, (2) bagi mereka yang sedang menulis, hasil kajian kritis ini dapat menjadi sumber pengembangan gagasan dalam pengembangan kajian pustaka, dan (3) bagi mereka yang telah melaksanakan penelitian dan sedang dalam proses mengembangkan laporan, kajian kritis ini dapat menjadi bahan perbandingan temuannya.

B. KAJIAN KRITIS

1. Pengembangan gagasan

Tulisan dalam artikel ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kondisi bangsa era global, dan *character building*. Tulisan disajikan dalam sembilan halaman dengan spasi satu tipe huruf font 12 times new roman. Penulis artikel mengembangkan tulisan ini dengan sejumlah tipe pengembangan gagasan, Setidaknya ada empat model pengembangan gagasan yang digunakan oleh penulis. Pola pengembangan yang digunakannya adalah definisi, ilustrasi, perbandingan, perincian, dan analisis. Pola definisi ditemukan pada paragraf ketujuh dan kedua belas, yakni definisi tentang rasa kebangsaan dan *Character Building*. Pola ilustrasi ditemukan pada paragraf ketiga, yakni ilustrasi tentang negara yang melakukan dorongan semangat dalam karakter bangsanya. Dalam hal ini dicontohkan antara lain di Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan sebentar lagi di Vietnam dan kesembilan. Pola analisis ditemukan pada paragraf 2, 3, 5, 6, 10, 13, yakni salah satu akibat dari semua krisis yang terjadi, yang tentu akan melahirkan ancaman disintegrasi bangsa. Pola ilustrasi ditemukan pada paragraf kedelapan belas. Paragraf yang variatif yang digunakan Soewandi dalam tulisan ini membuat tulisan ini menjadi menarik.

2. Fokus Pembahasan

Bagian awal tulisan ini tentang kondisi karakter bangsa dewasa ini. Bangsa Indonesia seperti halnya dengan bangsa-bangsa lain di dunia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan global yang semakin lama tidaklah semakin ringan. Di sisi lain, globalisasi juga membuktikan bahwa bangsa yang kuat dan tangguh akan sanggup untuk mengubah berbagai

tantangan itu menjadi peluang yang menguntungkan.

Selanjutnya, penulis menguraikan banyak kalangan yang melihat perkembangan politik, sosial, ekonomi dan budaya di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Bahkan, kekuatiran itu menjadi semakin nyata ketika menjelajah pada apa yang dialami oleh setiap warga negara, yakni memudarnya wawasan kebangsaan. Krisis ekonomi yang tidak kunjung henti berdampak pada krisis sosial dan politik, yang pada perkembangannya justru menyulitkan upaya pemulihan ekonomi. Konflik horizontal dan vertikal yang terjadi dalam kehidupan sosial merupakan salah satu akibat dari semua krisis yang terjadi, yang tentu akan melahirkan ancaman disintegrasi bangsa. Maka, sekarang ini adalah saat yang tepat untuk melakukan reevaluasi terhadap proses terbentuknya "*nation and character building*"

Selanjutnya disampaikan bahwa di negeri ini cukup banyak ditemukan sosok yang tidak tulus ikhlas, tidak bersungguh-sungguh, senang yang semu, senang yang basa-basi, yang lebih senang memilih budaya ABS (asal bapak senang), yang semua itu sangat merusak karakter individu dan mempunyai implikasi pada rusaknya karakter bangsa. Dalam koridor kebiasaan, masih cukup banyak dikembangkan kebiasaan-kebiasaan yang salah, seperti tidak menepati waktu, ingkar janji, saling menyalahkan, dan mengelak tanggung jawab. Dalam koridor memberi teladan, ternyata dalam kehidupan bermasyarakat kita masih sangat langka adanya teladan. Ketidaksanggupan sebuah bangsa dalam melakukan pembinaan karakter warga bangsanya berpotensi untuk menghadirkan beragam masalah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa.

Penulis menambahkan bahwa Karakter bangsa umumnya bersifat kolektif yaitu akumulasi dari karakter pribadi seluruh warga bangsanya. Komponen utama dari karakter bangsa adalah tata nilai atau *values* yang dibangun dan ditumbuhkembangkan oleh para warga bangsanya. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan sebuah bangsa menjadi sangat tergantung pada upaya pembinaan dan pembangunan karakter warga bangsanya. Upaya pembangunan karakter (*character building*) akan menjadikan rakyat Indonesia menjadi kumpulan masyarakat pekerja keras, penuh semangat juang yang tinggi, mampu saling bekerjasama secara produktif dengan sesama warga

bangsa, untuk menjadikan bangsanya bangsa yang maju dan berhasil dalam pembangunan.

Karakter bangsa Indonesia yang selama ini dikenal ramah tamah, gotong royong, dan sopan santun berubah menjadi penampilan preman yang beringas dan bengis, yang tega kepada sesamanya, yang tak peduli lagi pada nasib bangsanya. Kenyataan-kenyataan yang sedang kita alami, yang menunjukkan "hilangnya" jati diri individu-individu manusia Indonesia yang berakibat luntur dan rusaknya karakter bangsa Indonesia dan luntur atau "hilang"-nya jati diri bangsa. Pendidikan yang tinggi, kedudukan yang sangat terhormat, beragama pula, tetapi jika karakter yang baik tidak dimiliki, maka segalanya menjadi sia-sia.

3. Kekuatan dan Kelamahan Artikel

Tulisan Suparlan dalam artikel di atas lebih bersifat teoretis. Tulisan ini belum didukung oleh data yang menunjukkan bahwa krisis karakter di negeri kita, keberhasilan pembanguana karakter di negara lain yang dicontohkan. Gagasan yang dibangun dalam tulisan ini sudah terstruktur dengan baik. Beberapa paragraf yang ada dapat digunakan dalam membangun teori yang ada dalam sebuah kajian teori suatu penelitian, khususnya penelitian yang berhubungan dengan pendidikan karakter. Dalam artikel belum nampak adanya upaya riil yang berhubungan dengan pendidikan karakter, khususnya pendidikan karakter pada lingkungan sekolah. Sebaiknya perlu ditekankan bahwa pendidikan karakter di sekolah perlu dilakukan denganketeladanan mulai sekarang, mulai dari diri sendiri. Pendidikan karakter di sekolah juga perlu segera diimplementasikan melalui pengintegrasian dalam semua mata pelajaran, artinya tidak hanya pada mata pelajaran tertentu.

Artikel di atas juga belum banyak menuliskan tentang argumentasi dari penulisnya, sebagian besar uraian dalam artikel lebih banyak mengambil teori pembangunan karakter dari beberapa tokoh. Penulis sebaiknya menyampaikan ide dan tanggapannya dalam hal pembangunan karakter. Argumentasi penulis juga perlu dukungan data tentang pelaksanaan pembangunan karakter, khususnya di Indonesia. Artikel tentang pembangunan karakter relatif belum banyak ditulis, sehingga keberadaan artikel ini bisa menjadi pendrong untuk mengembangkan karya tulis tentang pembangunan

karakter. Artikel di atas memiliki kekuatan dalam hal landasan teori, karena didukung oleh teori yang relevan, yakni tentang pembangunan karakter.

Menindaklanjuti tulisan dalam artikel di atas, dipandang penting untuk mencobakannya dalam sebuah penelitian. Penelitian yang bisa diangkat sesuai dengan artikel ini adalah, misalnya penerapan metode atau media tertentu dalam upaya meningkatkan kualitas sikap yang mendukung keberhasilan pembelajaran. Perlu diperoleh informasi secara nyata melalui fakta lapangan tentang konsep-konsep strategi pembelajaran dalam upaya pendidikan karakter. Pendidikan karakter seyogyanya segera diimplementasikan dengan baik di dalam pembelajaran di kelas. Tawaran menarik dalam artikel ini perlu diimplementasikan dalam pendidikan karakter di berbagai mata pelajaran untuk berbagai jenjang pendidikan. Selama ini diskusi dirasakan kurang adanya upaya untuk melakukan pendidikan karakter melalui pembelajaran di kelas.

C. PENUTUP

Berdasarkan kajian terhadap tulisan Suparlan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, yakni :

- 1) Menyadarkan kepada pembaca akan pentingnya pendidikan karakter dalam upaya menanggulangi krisis multidimensi pada era globalisasi di Indonesia.
- 2) Menyadarkan pada dunia pendidikan untuk segera melakukan pendidikan karakter sedini mungkin, khususnya di sekolah.
- 3) Memberi dorongan kepada pembaca untuk ikut aktif dalam pendidikan karakter bangsa.
- 4) Memberi motivasi pada guru, khususnya peserta proram BERMUTU untuk melakukan PTK dengan topik yang berhubungan dengan pendidikan karakter bangsa.

D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">1) Mentor/fasilitator menyiapkan peserta agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran;2) Mentor/fasilitator mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat.3) Mentor/fasilitator menyampaikan garis besar cakupan materi karya tulis ilmiah kajian kritis.
Kegiatan Inti	<p>Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Mentor/fasilitator memberi informasi dan tanya jawab dengan contoh kontekstual tentang karya tulis ilmiah kajian kritis dengan menggunakan contoh yang kontekstual.2) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok F)3) Mentor/fasilitator memberi tugas4) Peserta diklat berdiskusi dan mengerjakan tugas/latihan5) Masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.6) Mentor/fasilitator memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok.
Kegiatan Penutup	<ol style="list-style-type: none">1) Mentor/fasilitator bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran2) Peserta melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.3) Mentor/fasilitator memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.4) Peserta merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.

E. Latihan/Kasus/Tugas

Susunlah kajian kritis sebuah karya tulis yang berhubungan dengan materi PPKn SMA/SMK!

Kelompok	Tugas
A	Terkait dengan materi PPKn Kelas X SMA semester 1
B	Terkait dengan materi PPKn Kelas X SMA semester 2
C	Terkait dengan materi PPKn Kelas X SMA semester 1
D	Terkait dengan materi PPKn Kelas XI SMA semester 2
E	Terkait dengan materi PPKn Kelas XII SMA semester 1
F	Terkait dengan materi PPKn Kelas XII SMA semester 2

F. Rangkuman

Secara umum kajian kritis terhadap artikel ini bertujuan menelusuri tulisan tertentu untuk keperluan pengembangan gagasan dalam sebuah artikel ilmiah. Secara khusus kajian kritis ini bertujuan untuk pengayaan konsep dan model-model pengembangan gagasan yang telah dilakukan oleh penulis. Manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan kajian kritis pada artikel ini adalah (1) bagi peserta kegiatan BERMUTU yang belum memiliki topik PTK, hasil kajian kritis ini dapat membentangkan jalan menuju identifikasi masalah, (2) bagi mereka yang sedang menulis, hasil kajian kritis ini dapat menjadi sumber pengembangan gagasan dalam pengembangan kajian pustaka, dan (3) bagi mereka yang telah melaksanakan penelitian dan sedang dalam proses mengembangkan laporan, kajian kritis ini dapat menjadi bahan perbandingan temuannya.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa pengalaman yang Bapak/Ibu dapatkan dalam kegiatan pembelajaran ini?
2. Apa manfaat kegiatan pembelajaran ini terhadap tugas Bapak/Ibu?

3. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu lakukan setelah kegiatan pembelajaran ini?

KUNCI JAWABAN LATIHAN/ KASUS/ TUGAS

Kegiatan Pembelajaran 1 (Soal Uraian)

1. Uraian dan contoh pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan modern adalah: mempelajari, mencermati, dan memperluas pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kaitannya dengan fenomena kehidupan modern sekarang ini. Contoh seperti penemuan tenaga nuklir, HP, komputer, laptop dan lainnya. HP kalau untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga, teman dan kebutuhan kantor, pekerjaan akan lebih efektif, dan sebagai wujud pengembangan nilai-nilai Pancasila.
2. Uraikan dan beri contoh cara-cara pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan modern. Cara-cara pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila adalah dengan cara mengkaitkan nilai-nilai Pancasila dengan fenomena kehidupan sebagai dampak penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru. Contoh: pergaulan/perkenalan lewat facebook, zaman sekarang banyak sekali pergaulan para remaja melalui facebook yang berakhir positif yaitu: terjadi perkawinan, tetapi juga banyak lewat pergaulan facebook terjadi penipuan, pemerkosaan dan kejahatan lainnya.
3. Uraikan dan beri contoh pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat modern adalah pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di masyarakat modern. Contoh berkat penemuan teknologi yang modern, sekarang ini banyak perdagangan melalui *online*, sistem ini rawan dengan penipuan, modalnya saling percaya antara pembeli dengan penjual, tetapi sistem perdagangan ini lebih efektif, sehingga banyak masyarakat yang melakukan jual beli dengan sistem ini.
4. Uraikan dan beri contoh pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara modern, artinya pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku dalam kehidupan bernegara yang modern. Pada pemerintah sistem demokrasi sekarang ini

kehidupan kenegaraan lebih bebas dan terbuka, contohnya: penyesuaian oleh KPK, dengan penyesuaian tersebut banyak sekali para pejabat yang tertangkap, baik melakukan korupsi, penyuapan, maupun tindak pidana lain, Pancasila menerima tindakan tersebut, teknik ini sebagai contoh pengembangan implementasi Pancasila dalam kehidupan kenegaraan modern.

5. Banyak sekali yang menjadi kendala pengembangan nilai-nilai Pancasila ke arah sikap dan perilaku yang positif. Kendala tersebut sebagai berikut:
 - a. Kebobrokan moral sebagian bangsa Indonesia.
 - b. Tingkat pendidikan sebagian besar yang masih rendah.
 - c. Tingkat ekonomi yang rendah.
 - d. Minimnya orang yang menjadi suri teladan dalam bersikap dan berperilaku (*Human modeling*).
 - e. Bangsa Indonesia kehilangan kepedulian, kehilangan jati diri, dan kehilangan kehalusan budi, akibatnya Sikap dan perilaku bangsa Indonesia sekarang bringas, mudah emosi, dan agresif.
 - f. Terjadi degradasi budi pekerti yang luhur, seperti saling hormat menghormati.

Cara mengatasi kendala pengembangan implementasi nilai-nilai Pancasila.

Pencegahan (preventif) antara lain melalui:

- a. Pendidikan baik secara formal maupun tidak formal.
- b. Secara formal melalui pendidikan secara integratif (Purcell, 2003) terutama melalui PPKn dan Pendidikan Agama.
- c. Melalui pendidikan ekstrakurikuler, seperti Pendidikan Pramuka, dan kegiatan lainnya yang dapat menanamkan sikap dan perilaku positif siswa.
- d. Pendidikan dan pembinaan di pondok pesantren, panti asuhan, dan jenis kegiatan pendidikan lainnya.
- e. Pengajian/siraman rohani atau ceramah agama yang banyak dilakukan masyarakat baik lewat media televisi atau majalah keagamaan.
- f. Peningkatan ekonomi rakyat.
- g. Percontohan sikap dan perilaku pejabat dan tokoh masyarakat dan pejabat negara (*human modeling Gagne, 1984*).

- h. Menghidupkan kembali budaya daerah dan nasional untuk pembentukan karakter bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- i. Memberi dukungan dan memperkuat KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi

Tindakan (Represif) antara lain:

- a. Penangkapan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana dan mengadili tanpa pandang bulu.
- b. Memberi hukuman sosial bagi yang melanggar norma sosial, moral dan adat istiadat.
- c. Memenjarakan (memasukan ke LP) supaya sadar akan sikap dan perilakunya.

Kegiatan Pembelajaran 2 (Soal Uraian)

Peranan nilai-nilai konstitusi bagi sebuah negara adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kredibilitas dan efektifitas pelbagai lembaga publik.
2. Menjamin kehidupan demokrasi dan "*public engagement*"; dan
3. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam rangka akuntabilitas badan-badan publik.

Kegiatan Pembelajaran 3 (Soal Uraian)

Esensi dari jati diri yang melatarbelakangi nilai-nilai nasionalisme dan patriotism adalah sebagai berikut:

1. Bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang dan anti penjajah.
2. Bangsa Indonesia cinta damai dan lebih cinta kemerdekaan.
3. Sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya luhur dan bersahabat.
4. Kesetaraan dan kemandirian perlu dipupuk terus untuk mengejar ketinggalan.

Kegiatan Pembelajaran 4 (Soal Uraian)

Untuk memecahkan permasalahan kinerja dan SDM dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan penguatan budaya hukum yang harus dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu: (1) Membangun sistem informasi pelayanan publik yang meliputi penyimpanan, pengelolaan dan

mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya; (2) Meningkatkan upaya publikasi, komunikasi dan sosialisasi penyelenggaraan pelayanan publik; (3) Mengembangkan pendidikan dan pelatihan hukum pelayanan publik; dan (4) Memasyarakatkan citra dan keteladanan-keteladanan penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan Pembelajaran 5 (Soal Uraian)

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 4 dan 33 ayat (1) yang dimana apabila kedua pasal tersebut disimpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum juga dan melanggar hak asasi manusia. Dalam hal terjadinya tindakan main hakim sendiri, bagi korban tindakan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang antara lain atas dasar ketentuan-ketentuan berikut:

- Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP oleh R. Sugandhi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cedera.

- Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan

Dalam penjelasan Pasal 170 KUHP oleh R. Sugandhi, kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum.

- Pasal 406 KUHP tentang Perusakan

Dalam penjelasan Pasal 406 KUHP oleh R. Sugandhi, perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum.

Pemecahan (solusi) dari maraknya kasus main hakim sendiri dalam masyarakat:

1. Gerakan penyadaran masyarakat melalui pembinaan dan pendidikan hukum
2. bagi korban tindakan main hakim sendiri dapat melapor pada pihak kepolisian atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas
3. bagi aparat penegak hukum harus menegakan hukum sesuai keadilan

Kegiatan Pembelajaran 6 (Produk Artikel)

Disesuaikan dengan sistematika penulisan artikel populer yang baik dan benar. Sistematikanya sebagai berikut:

1. Judul
2. Nama penulis
3. Abstrak dan kata kunci
4. Pendahuluan
5. Inti
6. Penutup
7. Daftar Rujukan

Kegiatan Pembelajaran 7 (Analisis Kasus)

Disesuaikan dengan kasus dan metode analisis permasalahan yang dipakai, dengan acuan:

1. Contoh kasusnya tepat
2. Langkah atau prosedurnya benar
3. Gambar/ skema/ tabel/ diagram yang digunakan sesuai
4. Content (faktor penyebab dan akibat, serta strateginya tepat)
5. Kerapian dan sistematika penulisan baik

Kegiatan Pembelajaran 8 (Soal Uraian)

1. Revitalisasi kesadaran politik masyarakat melalui optimalisasi PPKn di ranah sekolah dan praktis masyarakat; pendidikan politik yang dilakukan partai politik dan elit/aktor politik; penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, media massa, dan “duta politik”.
2. Mewujudkan budaya demokrasi partisipatif dalam masyarakat melalui keberadaan dan optimalisasi peran komite masyarakat, forum masyarakat dan bentuk-bentuk asosiasi yang demokratis lainnya yang dianggap strategis untuk mengimplementasikan demokrasi partisipatif.

Kegiatan Pembelajaran 9 (Soal Analisis Kasus)

1. Hubungan Indonesia dengan Malaysia terkait konflik Sipadan dan Ligitan.

Hubungan antara Indonesia dan Malaysia juga sempat memburuk pada tahun 2002 ketika kepulauan Sipadan dan Ligitan diklaim oleh Malaysia sebagai wilayah mereka, dan berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional (MI) di Den Haag, Belanda bahwa Sipadan dan Ligitan merupakan wilayah Malaysia.

Sipadan dan Ligitan merupakan pulau kecil di perairan dekat kawasan pantai negara bagian Sabah dan Provinsi Kalimantan Timur, yang diklaim dua negara sehingga menimbulkan persengketaan yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade. Sipadan dan Ligitan menjadi ganjalan kecil dalam hubungan sejak tahun 1969 ketika kedua negara mengajukan klaim atas kedua pulau itu.

Penyelesaian Kasus

Kedua negara tahun 1997 sepakat untuk menyelesaikan sengketa wilayah itu di MI setelah gagal melakukan negosiasi bilateral. Kedua belah pihak menandatangani kesepakatan pada Mei 1997 untuk menyerahkan persengketaan itu kepada MI. MI diserahkan tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa dengan jiwa kemitraan. Kedua belah pihak juga sepakat untuk menerima keputusan pengadilan sebagai penyelesaian akhir sengketa tersebut.

2. Hubungan Indonesia dengan Singapura terkait kabut asap penebangan hutan di Indonesia.

Pada Juni 2013, Singapura menderita akibat kabut yang berasal dari praktik tebang bakar untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di negara tetangga, Indonesia, provinsi Riau, Sumatera. Pada Juni 2013 kabut mencapai rekor terburuk, mencapai tingkat kabut polutan tertinggi sejak 1997. Kabut telah mendorong peringatan kesehatan dari pemerintah Singapura, warga Singapura yang marah juga menyebabkan beberapa ketegangan diplomatik, pemerintah Singapura memprotes keterlambatan di Indonesia dalam menangani masalah ini dan mendesak pemerintah Indonesia untuk mencari langkah-langkah efektif untuk mencegah terjadinya dan mengurangi polusi kabut asap lintas batas.

Penyelesaian Kasus

Singapura telah melakukan tindakan menggugat perusahaan Indonesia yang dianggap bertanggung jawab atas pembakaran hutan dan lahan pertanian, yang menyebabkan polusi asap yang membahayakan kesehatan penduduk Singapura. Dengan tindakan tegas tersebut, Indonesia harus merespon dengan baik melalui penegakan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukuman berat terhadap perusahaan yang terbukti melakukan kerusakan lingkungan juga harus segera dilakukan. Indonesia juga harus aktif untuk bekerjasama dengan negara-negara lain untuk keterlibatan dan partisipasinya dalam *green policy*.

3. Hubungan Indonesia dengan Myanmar terkait kasus pengungsi Rohingya

Pengungsi Rohingya akibat konflik etnis mulai berdatangan ke negara-negara tetangga (lokasi negara-negara yang dekat dengan Myanmar), salah satunya Indonesia. Mereka mencari suaka dari negara-negara yang didatanginya dan diperkirakan akan tinggal lebih lama di Indonesia karena sejauh ini tidak ada negara tujuan yang mau menerima mereka ditambah adanya penolakan dari Myanmar.

Penyelesaian Kasus

Tindakan yang dilakukan Indonesia sesuai dengan peranannya sebagai mediator integrator adalah dengan menawarkan penyelesaian masalah melalui beberapa upaya diplomatik yang dilakukan antar pemerintah Indonesia dengan pemerintah Myanmar. Indonesia akan mendorong penyelesaian tragedi Rohingya melalui tiga hal. Pertama, mendorong negara-negara kawasan untuk menelusuri akar permasalahan di balik bencana kemanusiaan yang menyebabkan ribuan orang terkatung-katung hidupnya di lautan. Kedua, melakukan kerjasama dengan organisasi nasional seperti UNHCR dan IOM untuk melakukan verifikasi serta *resettlement* atau pemindahan pengungsi ke tempat lain. Ketiga, negara-negara di kawasan Asean juga harus waspada terhadap isu perdagangan manusia. Sebab, perdagangan manusia disinyalir menjadi salah satu penyebab bencana kemanusiaan Rohingya terjadi. Sehingga, antar negara harus meningkatkan kerjasama pemberantasan perdagangan manusia lintas batas. Indonesia juga terus berusaha melakukan komunikasi dengan Myanmar, sebagai negara asal pengungsi Rohingya. Komunikasi

dilakukan dengan prinsip *constructive engagement* untuk mengajak Myanmar berdialog bersama-sama guna mencari solusi bagi Rohingya.

4. Hubungan Indonesia dengan Filipina terkait kasus penculikan dan penyanderaan warga negara Indonesia di Filipina

Dua kapal berbendera Indonesia dibajak di perairan Malaysia-Filipina, tepatnya di perbatasan antara Tawi-tawi, Filipina, dengan Sempurna, Malaysia. Ada sekitar 10 orang warga negara Indonesia (WNI) yang berada di dalam kapal tersebut. Dua kapal tersebut yaitu Kapal Tunda TB Henry dan Kapal Tongkang Cristi dibajak dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina, menuju Tarakan. Saat kejadian, 1 orang ABK tertembak, 5 orang selamat dan 4 orang diculik. Upaya pemerintah RI untuk membebaskan melalui jalur militer nampaknya terkendala izin pemerintah Filipina.

Penyelesaian Kasus

Saat ini Pemerintah Indonesia masih terus melakukan negosiasi dan koordinasi dengan Pemerintah Filipina. Pemerintah Indonesia menjalin langkah diplomatis, pendekatan intelejen, dan pendekatan militer apabila dalam kondisi mendesak. Pendekatan diplomatis, pemerintah Indonesia diharapkan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah Filipina termasuk lobi-lobi permintaan izin agar TNI Indonesia bisa ikut membantu Filipina untuk membebaskan sandera dan menangkap kelompok Abu Sayyaf. Pendekatan intelejen, Pemerintah Indonesia saat ini sudah menempatkan pasukan elitnya di perbatasan Filipina. Dalam waktu singkat pasukan yang bersiaga bisa digerakkan menuju pulau di Filipina yang disinyalir tempat menyekap 10 WNI. Pemerintah Indonesia juga harus mengupayakan langkah antisipasi agar warganya menghindari melintasi wilayah-wilayah dengan tingkat ketidakamanan yang tinggi atau potensi kriminal dan konflik.

5. Hubungan Indonesia dengan RRC terkait batas perairan di wilayah Natuna, Laut China Selatan

Ketegangan di kawasan Laut China Selatan meningkat. Ketegangan ini sudah terjadi sejak lama dan bersifat pasang surut. Ketegangan di kawasan ini kembali meningkat sejak awal Mei 2014. Peningkatan eskalasi ini dipicu pembangunan kilang minyak China His Yang Shi You 981 di wilayah yang dianggap masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinental Vietnam. China mengklaim wilayah Laut China Selatan berdasarkan fakta sejarah dimulai

era Dinasti Han 110 sebelum masehi. Selain itu, semakin masifnya China mengklaim wilayah tersebut dengan membangun infrastruktur semakin memicu reaksi dari negara yang wilayahnya bersinggungan dengan Laut China Selatan. Mereka adalah, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Philipina.

Penyelesaian Kasus

Pemerintah Indonesia harus tetap berada pada posisi sebagai penengah walaupun di sisi lain Indonesia juga tidak menghendaki klaim wilayah yang dilakukan RRC. Namun demikian perlu “sikap dewasa, cerdas, dan bijaksana” yang dilakukan Indonesia dalam menyikapi kasus tersebut. Indonesia harus berperan bagaimana tetap menjaga kestabilan, keamanan, dan perdamaian di wilayah tersebut. Maksud ini dapat terwujud apabila negara-negara yang terlibat konflik dalam kawasan ini menyelesaikan dengan jalan damai melalui kesepakatan-kesepakatan. Sehingga apresiasi untuk pemerintah Indonesia yang terus mendorong tercapainya *Code of Conduct (CoC)* antara ASEAN dan China soal wilayah tersebut, serta membawa persoalan tersebut dalam KTT ASEAN. Pencapaian COC saat ini sudah masuk tahap negosiasi. Indonesia juga harus terus mendorong penyelesaian sengketa tetap di tangan negara-negara yang bersangkutan.

Kegiatan Pembelajaran 10 (Produk Instrumen Penilaian)

Contoh penerapan model penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan sudah ada di modul.

Kegiatan Pembelajaran 11 (Produk RPP)

Penyusunan RPP menyesuaikan sistematika RPP dalam Permendikbud 103 Tahun 2014

Kegiatan Pembelajaran 12 (Produk RPP)

Contoh penyusunan kajian kritis sudah ada di modul.

EVALUASI

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang betul dengan memberi tanda silang pada huruf **A**, **B**, **C**, atau **D** di lembar jawaban.

BAGIAN A KOMPETENSI PROFESIONAL

1. Pernyataan berikut ini yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi dasar bagi kehidupan modern bernegara adalah
 - (A) komputerisasi di kantor pelayanan desa untuk peningkatan fungsi pelayanan masyarakat
 - (B) penggunaan *facebook* sebagai sarana dan media sosial untuk melakukan pergaulan bebas di kalangan remaja
 - (C) penggunaan kecanggihan teknologi untuk melakukan eksploitasi besar-besaran tambang emas di Papua oleh PT Freeport
 - (D) kecanggihan alat komunikasi modern yang digunakan KPK untuk melakukan penyadapan guna mengungkap kasus-kasus korupsi yang merugikan negara
2. Analisis pengembangan nilai-nilai Pancasila dimaknai sebagai kegiatan
 - (A) mengkritisi kebijakan-kebijakan dari pemerintah Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
 - (B) mencermati dan melakukan seleksi serta filtrasi terhadap kebudayaan dan peradaban luar negeri yang masuk ke Indonesia
 - (C) mengembangkan segala usaha untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen melalui indoktrinasi nasional
 - (D) mempelajari, mencermati, memaknai, dan memperluas pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Karakter kebangsaan yang dimiliki para tokoh pendiri negara Indonesia yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah
 - (A) perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan

- (B) mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
 - (C) mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat setiap orang serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
 - (D) komitmen dan sikap yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
4. Strategi pembinaan ideologi untuk mengatasi permasalahan disintegrasi bangsa adalah
- (A) memfungsikan lembaga-lembaga negara sesuai dengan ketentuan konstitusi
 - (B) menanamkan dan memantapkan persatuan dan kesatuan yang bersumber pada asas kerohanian ideologi Pancasila
 - (C) pemerataan pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan sektor
 - (D) mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui pemupukan solidaritas berbagai forum global
5. Strategi preventif mengatasi konflik antar-suku, agama, ras, dan golongan dilakukan melalui
- (A) meredam konflik melalui operasi militer
 - (B) menjadikan keragaman sebagai kekayaan nasional
 - (C) mengembangkan sikap toleransi dalam keberagaman
 - (D) menciptakan keseragaman pandangan dengan indoktinisasi
6. Strategi meningkatkan implementasi nilai nasionalisme dan patriotisme dalam pembangunan ekonomi adalah
- (A) meningkatkan fasilitas pelayanan informasi dan komunikasi di perkotaan
 - (B) meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di daerah-daerah terpencil
 - (C) membangun industri dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk di desa
 - (D) memberikan bantuan langsung tunai berbentuk uang dan sembako kepada rakyat miskin

7. Perwujudan pengembangan implementasi nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dalam bentuk
 - (A) pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di masyarakat
 - (B) mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia
 - (C) penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
 - (D) kebebasan yang bertanggung jawab setiap warga negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan
8. Pengembangan implementasi nilai-nilai UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dilakukan melalui....
 - (A) menekankan nilai-nilai perbedaan dalam keberagaman
 - (B) bersikap dan bertindak secara komprehensif dan integral
 - (C) mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari
 - (D) mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi
9. Untuk memberi solusi demi tetap terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI sesuai dengan nilai-nilai Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diperlukan pemimpin yang
 - (A) tegas, kuat, militan, militer, dan otoriter untuk kepentingan negaranya
 - (B) memiliki kecerdasan intelektual mengenai konstitusi dan ilmu kenegaraan
 - (C) pandai berdiplomasi dan menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain
 - (D) mampu menciptakan rekonsiliasi dan konsolidasi nasional untuk integrasi bangsa
10. Mengembangkan nilai-nilai hukum ditengah dinamika global merupakan contoh tindakan inovasi yang mencerminkan tanggungjawab warga negara dalam ...
 - (A) memecahkan persoalan-persoalan negara yang berlandaskan hukum
 - (B) mengembangkan kehidupan masyarakat yang taat hukum ditengah dinamika global

- (C) mewujudkan partisipasi aktif warga negara dalam rangka perlindungan dan penegakan hukum
 - (D) memelihara dan memperbaiki proses kehidupan bernegara yang selaras dengan dinamika hukum
11. Cara untuk mengatasi carut marutnya hukum dan peradilan di Indonesia adalah
- (A) menerapkan budaya hukum
 - (B) meningkatkan gaji aparat penegak hukum
 - (C) meningkatkan jumlah aparat penegak hukum
 - (D) melakukan penataan peraturan perundang-undangan
12. Perbaikan di sektor pelayanan publik yang berkaitan dengan sumber daya aparatur negara dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia dilakukan melalui
- (A) peningkatan transparansi biaya pengurusan pelayanan publik
 - (B) transparansi rekrutmen dan memperketat seleksi aparatur negara
 - (C) peningkatan kualitas kinerja pegawai yang berkecimpung di pelayanan publik
 - (D) mempercepat terbentuknya peraturan perundang-undangan tentang standar pelayanan publik
13. Perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah
- (A) ketercapaian visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan
 - (B) keefektifan dan keefisienan dalam pelayanan masyarakat
 - (C) keterbukaan informasi dan komunikasi kebijakan pemerintah
 - (D) kebijakan publik yang berwawasan dan berpandangan kedepan
14. Upaya kuratif penanganan korupsi di Indonesia yaitu
- (A) melaksanakan pendataan terhadap kekayaan pejabat negara
 - (B) melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan
 - (C) menghukum seberat-beratnya para pelaku korupsi tanpa “tebang pilih”
 - (D) menjalankan sistem penganggaran yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel
15. Untuk mengatasi dampak budaya politik parokial dan kawula diperlukan ...
- (A) pimpinan yang tegas dan bertanggung jawab
 - (B) peraturan perundang-undangan yang mencakup seluruh aspirasi rakyat

- (C) usaha pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah konflik antar daerah
 - (D) strategi yang tepat untuk mewujudkan budaya politik partisipan atau demokratis
16. Cara pandang yang tepat terhadap sub-budaya yang menjadi permasalahan dalam budaya politik di Indonesia adalah
- (A) mengakui dan menjadikan sub-budaya sebagai bagian budaya politik nasional demi kepentingan pemerintah pusat
 - (B) menyeragamkan berbagai sub-budaya yang ada di Indonesia melalui penguatan dan peningkatan indoktrinasi Pancasila
 - (C) menghilangkan berbagai sub-budaya yang ada di Indonesia sebagai bentuk pencegahan terhadap gerakan separatis dan disintegrasi
 - (D) mengakui dan menjadikan sub-budaya sebagai bagian budaya politik nasional agar kepentingan sub-budaya tersebut tetap terwakili
17. Contoh peranan Indonesia dalam hubungan Internasional di bidang politik adalah
- (A) memberikan bantuan kemanusiaan untuk korban perang di Gaza Palestina
 - (B) menggelar pertukaran pelajar dan mahasiswa, serta festival seni budaya ASEAN
 - (C) mengirimkan pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
 - (D) mendukung pembentukan pasar bebas di kawasan ASEAN (AFTA) dan ASIA Pasifik (APEC)
18. Contoh kerjasama yang pernah dikembangkan oleh Indonesia dalam bentuk Law Making Treaties adalah
- (A) perjanjian Indonesia dengan RRC pada tahun 1955 tentang dwi kewarganegaraan
 - (B) konvensi hukum laut tahun 1958 tentang Laut teritorial, Zona Bersebelahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua
 - (C) kesepakatan Indonesia dengan sembilan negara anggota ASEAN dalam perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
 - (D) perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 di Tampaksiring Bali

19. Perhatikan faktor penyebab dari berbagai permasalahan-permasalahan HAM berikut:

- (1) Maraknya konflik horizontal di kalangan antarwarga
- (2) Peraturan prundang-undangan yang belum mendukung
- (3) Tindakan pelanggaran oleh oknum aparat hukum
- (4) Norma adat yang bertentangan dengan HAM
- (5) Stratifikasi dan status sosial di masyarakat

Faktor kondisi sosial budaya yang menjadi penyebab berbagai permasalahan HAM di Indonesia ditunjukkan pada nomor

- (A) 1, 2, dan 3
- (B) 1, 3, dan 4
- (C) 1, 4, dan 5
- (D) 3, 4, dan 5

20. Permasalahan dalam implementasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang diakibatkan karena faktor kemajuan informasi dan teknologi adalah

- (A) kurangnya pemanfaatan kecanggihan teknologi dalam mengungkap isu-isu HAM
- (B) keterbatasan pembiayaan dalam menciptakan berbagai inovasi teknologi dan komunikasi
- (C) kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih belum optimal dalam pendayagunaan iptek
- (D) minimnya fungsi kontrol dan seleksi terhadap arus informasi dan komunikasi terutama di dunia maya

BAGIAN B KOMPETENSI PEDAGOGIK

21. Langkah awal harus dilakukan dalam pengembangan silabus adalah
- (A) mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai dengan standar isi
 - (B) mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar
 - (C) merumuskan indikator pencapaian kompetensi sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar
 - (D) menentukan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif
22. Pak Kasman adalah seorang guru PPKn SMA. Ia mengajar di kelas X yang sebagian besar siswanya cenderung pasif dan ada dua siswa yang membutuhkan khusus, serta kelas XI yang sebagian besar siswanya aktif. Dari kondisi siswa yang demikian, maka penyusunan dan pengembangan RPP yang dilakukan Pak Kasman harus mempertimbangkan
- (A) kebutuhan materi peserta didik
 - (B) perbedaan individu peserta didik
 - (C) indikator pencapaian kompetensi
 - (D) metode yang mendorong keaktifan peserta didik
23. Dalam penyusunan RPP harus memperhatikan kondisi siswa. Kondisi siswa yang cenderung pasif dalam pembelajaran dapat diatasi melalui
- (A) memberikan umpan balik dan tindak lanjut pada siswa
 - (B) memberikan latihan dan menyediakan bahan bacaannya
 - (C) memberikan stimulus yang mendorong keaktifan siswa
 - (D) penugasan dalam bentuk pengisian lembar kerja siswa
24. Dalam pengembangan RPP, identifikasi materi yang menunjang kompetensi dasar harus mempertimbangkan lingkungan sekolah. Hal ini dimaksudkan agar
- (A) sesuai dengan tuntutan dan kepentingan lingkungannya
 - (B) memiliki relevansi dengan kondisi dan perkembangan riil
 - (C) memberikan kebermanfaatan bagi peserta didik untuk berkembang
 - (D) meningkatkan perkembangan intelektual, emosional dan sosial siswa

25. Penilaian menyajikan:

- (1) Konstruksi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dicapai melalui penyelesaian tugas;
- (2) Peserta didik telah memainkan peran aktif dan kreatif;
- (3) Keterlibatan peserta didik dalam melaksanakan tugas sangat bermakna bagi perkembangan pribadi mereka;
- (4) Walau dengan satuan waktu yang berbeda, dapat mencapai hasil akhir.
- (5) Laporan nilai tersedia setiap saat.

Penilain otentik yang bermakna bagi guru untuk menentukan cara-cara terbaik adalah

- (A) (1), (2), (3), dan (4)
- (B) (1), (2), (3), dan (5)
- (C) (1), (2), (4) dan (5)
- (D) (1), (3), (4) dan (5)

26. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toleran, responsif dan proaktif serta bijaksana dalam kegiatan pembelajaran PPKn, instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur indikator tersebut menggunakan

- (A) lembar penilaian unjuk kerja
- (B) penilaian antar teman sejawat
- (C) lembar observasi sikap saat kegiatan diskusi
- (D) penilaian diri oleh peserta didik yang bersangkutan

27. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam penilaian:

- (1) Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai.
- (2) Kemampuan pengelolaan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan.
- (3) Relevansi, kesesuaian dengan mata pelajaran, dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam pembelajaran.
- (4) Keaslian, peserta didik harus merupakan hasil karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap peserta didik.

Pada Penilaian Proyek setidaknya ada 3 (tiga) hal yang perlu dipertimbangkan yaitu:

- (A) 1, 2, dan 3
 - (B) 1, 3, dan 4
 - (C) 2, 1, dan 4
 - (D) 2, 3, dan 4
28. Penilaian portofolio dalam mata pelajaran PPKn tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dilakukan untuk mengukur kompetensi tentang interaksi antar peserta didik yang terintegrasi dalam bentuk
- (A) studi lapangan
 - (B) bekerja dalam kelompok
 - (C) praktik kewarganegaraan
 - (D) komunikasi dengan orang tua
29. Penyusunan kajian kritis dalam penelaahan suatu artikel ilmiah ditujukan untuk
- (A) menguji validasi dan reabilitas hipotesis
 - (B) menelaah obyektivitas opini yang dibangun penulis
 - (C) pengayaan konsep dan model-model pengembangan gagasan
 - (D) penelusuran kebenaran fakta-fakta yang dijadikan bahan atau materi dalam tulisan
30. Perhatikan paragraf berikut: "Sebuah bangsa akan maju dan jaya bukan disebabkan oleh kekayaan alam, kompetensi, ataupun teknologi canggihnya, tetapi karena dorongan semangat dan karakter bangsanya. Contohnya negara Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan menyusul Vietnam. Bangsa yang didorong oleh karakter bangsanya akan menjadi bangsa yang maju dan jaya. Sementara bangsa yang kehilangan karakter bangsanya akan sirna dari muka bumi (Haynes, C, 2008). Makna paragraf tersebut memuat pola
- (A) definisi
 - (B) analisis
 - (C) ilustrasi
 - (D) evaluasi

PENUTUP

Modul Guru Pembelajar ini disusun sebagai salah satu bahan referensi atau literatur dalam penyelenggaraan Program Guru Pembelajar. Modul ini merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta mampu meningkatkan kualitas pembelajaran baik dalam ranah pedagogik maupun profesional. Alangkah lebih baik apabila peserta diklat juga mencari, menambah, dan mengembangkan sumber-sumber belajar lain yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan karakteristik daerah masing-masing agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih kontekstual dan bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Allen, L. (1973). *An Examination of the Ability of Third Grade Children from the Science Curriculum Improvement Study to Identify Experimental Variables and to Recognize Change*. *Science Education*.
- Arifin, E. Zainal. 2003. *Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Gramedia
- Bakry, Ms, Noor. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Subroto, Drs. *PPKn Keuangan Intermediate*, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta.
- Basrie, Chaidir. 1998. *Bela Negara Implementasi dan Pengembangannya (Penjabaran Pasal 30 UUD 1945)*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Coutinho, M., &Malouf, D. (1993). *Performance Assessment and Children with Disabilities: Issues and Possibilities*. *Teaching Exceptional Children*, 25(4), 63–67.
- C.S.T. Kansil. 2007. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Cumming, J. J., & Maxwell, G. S. (1999). *Contextualizing Authentic Assessment*. *Assessment in Education*, 6(2), 177–194.
- Dantes, Nyoman. 2008. *Hakikat Asesmen Otentik Sebagai Penilaian Proses dan Produk Dalam Pembelajaran yang Berbasis Kompetensi (Makalah Disampaikan pada In House Training (IHT) SMA N 1 Kuta Utara)*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha
- Darmadi, Hamid. 2010. *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2003.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press, 1995.
- Elly M. 1995. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Gagne, R.M. 1984. *The Conditions of Learning and Theory of Instruction*. New York: Holt, Rinehart and Wiston.
- Gatlin, L., & Jacob, S. (2002). *Standards-Based Digital Portfolios: A Component of Authentic Assessment for Preservice Teachers*. Action in Teacher Education.
- Hardjosoekarto, Sudarsono. Hubungan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta, 2008.
- Harmantyo, Djoko. Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah dan Pola Perkembangan Wilayah di Indonesia. Disampaikan pada Seminar Nasional dan PIT-IGI tanggal 21-23 Oktober 2011 di Bali.
- Hartomo. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Media Pustaka.
- James AF Stoner, Manajemen, edisi Indonesia, PT. Prehallindo, Jakarta
- Ratminto & Atik Septi Winarsih (2005), *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan dan Ahmad Zubaidi. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Penerbit Paradigma Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke 3. 2000. Depdiknas. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Semester 2* . Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud
- _____ 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 2* . Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum. 2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Millan, J.H. Mc. dan Schumacher, S. (2001). *Research in Education: A Conceptual Introduction* Fifth Edition. New York: Longman.

- Milton J. Esman, eds. (1969). *Pengembangan Lembaga : Dari Konsep dampai Aplikasinya*, Jakarta: UI Press, 1969.
- Na'im, Ainun. *PPKn Keuangan 2*, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta.
- Pandji Santosa, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: PT. Reflika Aditama, 2008.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Edisi Indonesia, Jakarta: Prenada Media.
- Prasojo, Eko, *Desentralisasi dan pemerintahan daerah: antara model demokrasi local dan efisiensi structural*. Depok : Departemen Ilmu administrasi Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006.
- Padilla, M., Cronin, L., & Twiest, M. (1985). *The Development and Validation of the Test of Basic Process Skills. Paper Presented at the Annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching*, French Lick, IN.
- Quinn, M., & George, K. D. (1975). Teaching Hypothesis Formation. *Science Education*, 59, 289-296.
- Sampara Lukman. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Shrigley,R.L. & Koballa,T.R. 1992. *A Decade of Attitude Research Based on Hovland's Learning Theory Model*, *Seince Education*,76 ((1) New York : John Wiley & Sons,Inc.
- Soehino. 1985. *Hukum Tatanegara*, Yogyakarta: Liberty
- Subagyo, dkk. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan.Semarang*: UPT UNNES Press.
- Sudarwan. 2013. *Pendekatan-pendekatan Ilmiah dalam Pembelajaran*. Pusbangprodik
- Sukaya, Endang Zailani, dkk.2002. *Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Sukmadinata, N.Sy. (2007). *Metode Penelitian Pendidika*. Bandung: PPS UPI &Rosda. Cet. III
- Sumarsono S, dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Thiel, R., & George, D. K. (1976). *Some Factors Affecting the use of the Science Process Skill of Prediction by Elementary School Children. Journal of Research in Science Teaching.*
- Tomera, A. (1974). *Transfer and Retention of Transfer of the Science Processes of Observation and Comparison in Junior High School Students. Science Education.*
- Yuhana, Abdy. 2007. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Bandung: Fokusmedia.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar 1945, Hasil Amandemen Tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Permendikbud 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Standar Nasional Pendidikan.

Permendikbud No 59 Tahun 2014 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas Madrasah/Aliyah

Permendikbud 64 tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permendikbud 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permendikbud 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Permendikbud 81 tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Internet

Badan Litbang dan Diklat. 2015. *Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara (Online)* diambil dari <http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/konten-download/konten-kediklatan/kesadaran-berbangsa-dan-bernegara.html> pada tanggal 3 Desember 2015

Goto Kuswanto,. 2012. 'Pelaksanaan Good Governance di Indonesia,' Pemerintah Kabupaten Banyumas,. (Online). Diakses dari , <http://www.banyumaskab.go.id/read/15538/pelaksanaan-good-governance-di-Indonesia>, diakses pada 5 Desember 2015.

Nanang, 2010. 'Keudukan dan Peran Pemerintah Daerah', (Online). Diakses dari <http://www.mikirbae.com/2015/11/keudukan-dan-peran-pemerintah-daerah.html>>, diakses pada 5 Desember 2015.

Enceng. 2013. Model Hubungan Pusat Dan Daerah. (Online). Diakse dari <http://www.ut.ac.id>. Diakses tanggal 27 april 2013.

Iskandar Putra. *Tutorial LMS MOODLE*. {Online}. diakses dari s2c3r.mdl2.com/mod/resource/view.php?id=14 pada 20 Desember 2015

Problem Based Learning Cases for High School Sciences; <http://msid.ca/umedia/AgBioPBLCases.pdf>

Problem Based Learning and Examples of Science Lesson Ideas; http://stem.browardschools.com/science/science_general/pbl/

<http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2011/05/26/8878/27/Solo-Memang-Beda/>

<http://dpd.go.id/profil/fungsi-tugas-wewenang>

<http://dpr.go.id/profil/fungsi-tugas-wewenang>

<http://www.bappenas.go.id>

Jurnal

Effendi, Sofian. 2005. *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance*. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.

Bambang Brodjonegoro dan Jorge Martinez-Vazquez. *An Analysis of Indonesia's Transfer Sistem: Recent Performance and Future Prospects*. Makalah pada Konperensi bertema *Can Decentralization Help Rebuild Indonesia?*, 2002.

Devas, Nick. *Indonesia: What do we mean by decentralization?* dalam *Public Administration and Development Journal*, Vol. 17, 1997.

Dwipayana, Ari. *Menata Desain Desentralisasi Indonesia*. Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

Grisham-Brown, J., Hallam, R., & Brookshire, R. (2006). *Using Authentic Assessment to Evidence Children's Progress Toward Early Learning Standards*. *Early Childhood Education Journal*, 34(1), 45–51.

GLOSARIUM

- Masyarakat pluralistik : Masyarakat yang bersifat plural yang terdiri dari beragam suku, etnik, golongan, agama, pandangan politik, dll.
- Ikatan primordial : Ikatan yang muncul dari perasaan yang lahir dari apa yang ada dalam kehidupan sosial, yang sebagian besar berasal dari hubungan keluarga, ikatan kesukuan tertentu, keanggotaan dalam keagamaan tertentu, budaya, bahasa atau dialek tertentu, serta kebiasaan-kebiasaan tertentu, yang membawakan ikatan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat.
- Konflik vertikal : Konflik antara pemerintah dengan rakyat, termasuk di dalamnya adalah konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
- Konflik horizontal : Konflik antarwarga masyarakat atau antarkelompok yang terdapat dalam masyarakat.
- Nasionalisme : Paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri.
- Patriotisme : Sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya; semangat cinta tanah air.
- Globalisasi : Proses masuknya ke ruang lingkup dunia.
- Hak : Semua hal yang harus diperoleh atau dapatkan.
- Kewajiban : Segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- Hak warga negara : Seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara.
- Kewajiban warga negara : Tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana di atur dalam

	ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kekuasaan	: Kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik.
Oposan	: Orang atau golongan yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik.
Eksekutif	: Kekuasaan menjalankan undang-undang.
Legislatif	: Kekuasaan membuat undang-undang.
Yudikatif	: Kekuasaan mengawasi undang-undang.
Kesadaran hukum	: Kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.
Supremasi hukum	: Upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara.
Demokrasi	: (atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat
Eksplotasi	: Pemanfaatan, pengisapan, pemerasan untuk keuntungan sendiri.
Vonis	: Putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan.
Korupsi	: Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Kolusi	: Kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji.
Nepotisme	: Kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah.
Geostrategi	: Usaha dengan menggunakan segala kemampuan

atau sumber daya baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

- Mentalitas : Keadaan dan aktivitas jiwa (batin), cara berpikir, dan berperasaan.
- Komprehensif integral : Menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- Antagonis : Pelaku yang suka menentang atau melawan.
- Gatra : Lingkungan/ kondisi tertentu.



PPPPTK Pkn DAN IPS

**Jln. Arhanud, Pendem, Kec. Junrejo
KOTA BATU – JAWA TIMUR**

Telp. 0341 532 100

Fax. 0341 532 110

Email p4tk.pknips@gmail.com

www.p4tkpknips.id